

SKRIPSI

**PENGUATAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL**



**Disusun Oleh:
Febilia Ester Wonatorei
21520085**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025**



HALAMAN JUDUL

PENGUATAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta



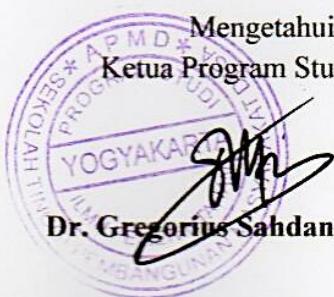
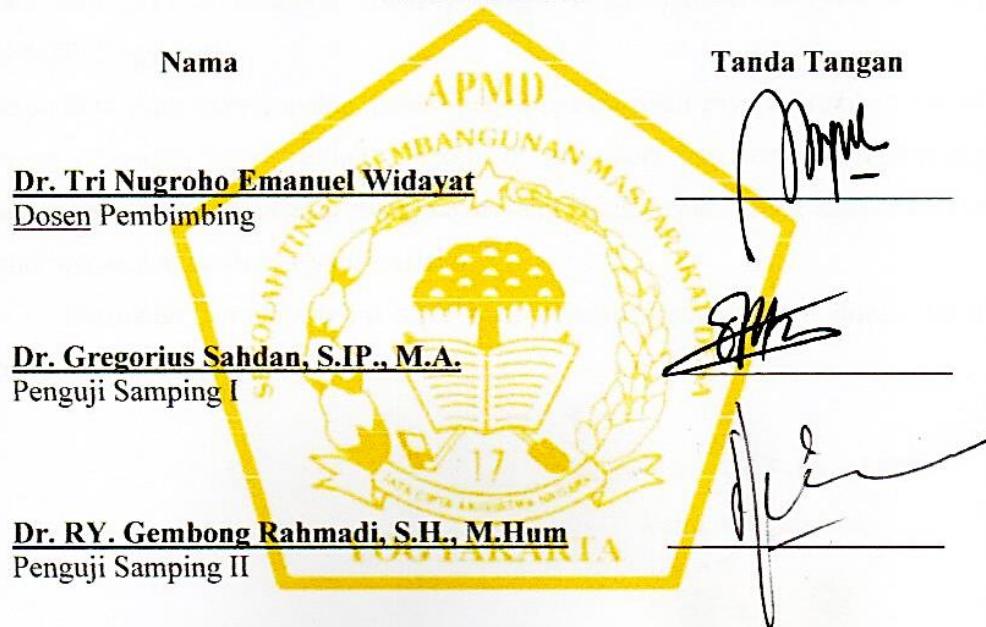
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin
Tanggal : 3 Maret 2025
Jam : 10.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febilia Ester Wonatorei
NIM : 21520085
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PENGUATAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL**" adalah karya tulis yang saya buat sendiri, disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang strata satu (S1) di Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Semua data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kekurangan data atau pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Februari 2025

Yang menyatakan,



Febilia Ester Wonatorei
21520085

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Febilia Ester Wonatorei
NIM : 21520085
Telp : 082137183706
Email : febiwonatorei4429@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"PENGUATAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL" beserta perangkat
yang diperlukan (apabila ada).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 26 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Febilia Ester Wonatorei
21520085

MOTTO

“Fortis Fortuna Adiuvat”
Keberuntungan berpihak pada mereka yang berani
Filipi 4:6

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”
1 Petrus 3:4

“Biarlah kecantikanmu berasal dari dalam hatimu, yaitu hati yang lemah lembut dan tenang”

“Pulanglah sebagai sarjana itu adalah bentuk tanggung jawab ke orangtua atas pengorbanan mereka, lewati badainya dan bawa orangtua duduk di gedung wisuda sambil menyaksikan anaknya pengunciran tali toga”

-Febilia Ester Wonatorei-

“Jatuh hatilah pada perjalananmu, pada segala kesulitanmu, dan pada kesendirianmu. Beberapa bunga terlihat lebih indah karena tumbuh diantara tebing-tebing curam dan menakutkan”

-Febilia Ester Wonatorei-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan perlindungan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik, terutama dalam proses penggerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir. Berbagai cobaan dan tantangan saya hadapi, namun dengan doa dan keyakinan, baik dari diri saya sendiri maupun orang tua, saya mampu melewati semuanya dan memperoleh hasil yang terbaik.

Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari dukungan serta bantuan dari keluarga dan juga orang tua. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada keluarga tercinta, terutama Mama Adolina Wonatorei, Bapak Abdul Rahman, Mamatua Susana Wonatorei, Bapatua Jonta Tanatti, Umi Lina, Abah Mohamad Uswanas, serta almarhumah Tante Betty dan almarhum kakek dan nenek Wonatorei. Terima kasih atas semua kasih sayang yang diberikan kepada saya, semua doa yang selalu dipanjatkan tiada lelah, serta pengorbanan finansial yang tidak terhitung angkanya yang diberikan untuk saya.
2. Kepada adik perempuan saya, Adelia Naomi Wonatorei. Kamu saya abadikan dalam sebuah lagu yang begitu bermakna, NINA dari Feast, dengan lirik:
*“Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu
Jadi lebih baik dibanding diriku
Tuk sementara ini aku mengembara jauh
Saat dewasa kau kan mengerti”*
3. Dan yang terakhir, saya persembahkan pencapaian ini untuk diri sendiri yang telah berjuang melewati malam-malam penuh keraguan, lelah yang tak terhitung, serta jatuh bangun dalam proses yang panjang. Terima kasih telah bertahan, melangkah, dan tidak menyerah. Ini adalah bukti bahwa segala usaha dan doa tidak pernah sia-sia.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian yang berjudul: **“Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul”** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

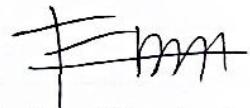
Dalam karya tulis skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Tetapi penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat diwujudkan bila tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dan sekaligus sebagai Dosen Penguji 1 yang telah meluangkan waktu untuk menguji, mengarahkan, serta memberikan saran dan perbaikan dalam menyelesaikan Skripsi ini
3. Bapak Dr. RY. Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji 2 yang telah meluangkan waktu untuk menguji, mengarahkan, serta memberikan saran dan perbaikan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini. Tiada kata yang dapat menggambarkan rasa terima kasih saya selain ungkapan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah Bapak berikan.

5. Pemerintah Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Kampus tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta tempat saya belajar, menuntut ilmu, dan mengapai cita-cita saya.
7. Kepada pacar saya, I Dewa Putu Gede Krisna Adi Gunawan, terima kasih telah menjadi support system yang selalu ada dalam setiap keadaan, terutama dalam mendukung saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat saya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan bantuan kalian sepanjang perjalanan perkuliahan, Terlebih, pada saat mengerjakan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 26 Februari 2025

Penyusun,



Febilia Ester Wonatorei
21520085

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9
F. Literatur Review	9
G. Kerangka Konseptual.....	19
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK).....	19
2. Tujuan Dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)	23
3. Penguatan.....	25
4. Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)28	28
5. Fungsi dan Peran LPMK	30
6. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).....	34
7. Partisipasi Masyarakat	43

H. Metode Penelitian	47
1. Jenis Penelitian	47
2. Unit Analisis	48
3. Teknik Pengumpulan Data	48
4. Teknik Analisis Data	49
BAB II GAMBARAN UMUM LPMK TRIWIDADI	52
A. LPMK Triwidadi	52
1. Struktur LPMK	53
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	56
1. Memperkuat Struktur LPMK.....	56
2. Fungsi Dan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)	59
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	69
4. Sumber Daya Manusia Dalam Hal Masyarakat Triwidadi.....	74
5. Partisipasi Masyarakat	82
B. Efektivitas Peran LPMK.....	85
1. Efektivitas Peran LPMK dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat	86
2. Efektivitas Peran LPMK dalam Mendorong Kapasitas Pengurus LPMK	89
3. Efektivitas Peran LPMK dalam Mendorong SDM Masyarakat	91
4. Efektivitas Kewenangan LPMK	93
5. Efektivitas Anggaran Program LPMK	94
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108

INTISARI

Penelitian ini membahas penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Triwidadi dalam pembangunan Kalurahan. LPMK memiliki peran strategis dalam menampung aspirasi masyarakat dan membantu perencanaan serta pelaksanaan pembangunan. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi peran LPMK, seperti tumpang tindih tugas dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBDJ), serta keterbatasan anggaran.

Metode penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Triwidadi dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator pembangunan di tingkat kalurahan dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penguatan LPMK Triwidadi, baik dari segi struktur organisasi, kewenangan, partisipasi masyarakat, maupun dukungan pemerintah. Data dikumpulkan melalui berbagai teknik, termasuk observasi, wawancara dengan informan kunci seperti pengurus LPMK, pemangku kepentingan di tingkat kalurahan, serta analisis dokumentasi yang relevan. Proses penelitian ini dilakukan dengan melihat secara khusus penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Triwidadi dalam menjalankan perannya hal ini memastikan bahwa informan yang diperoleh akurat serta relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan LPMK Triwidadi melibatkan struktur organisasi yang proporsional, manajemen yang baik, peningkatan kapasitas SDM, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Partisipasi masyarakat dan kemampuan membangun relasi dengan pemangku kepentingan menjadi faktor pendukung utama. Namun, keterbatasan anggaran dan tumpang tindih kewenangan dengan TPK dan TPBDJ menjadi hambatan dalam efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Kata Kunci: LPMK, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Kalurahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 94 menyatakan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat kalurahan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan dalam pembangunan desa, dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dikalurahan, maupun dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikalurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) secara formal merupakan lembaga lokal yang diharapkan dapat menjalankan perannya. LPMK merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang menunjuk pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa: Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, pembentukan lembaga kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud dilakukan atas prakasa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai fasilitator pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayaikan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002).

Saat ini LPMK diberikan mandat yang semakin besar untuk mengelola sejumlah program atau kegiatan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat. Program atau kegiatan yang diberikan pengelolaannya kepada LPMK tersebut sifatnya strategis, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, jangka panjang dan memerlukan partisipasi masyarakat. Dengan berperannya LPMK diharapkan dapat mengakomodasikan tuntutan masyarakat secara menyeluruh, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Dengan begitu akan membantu pemerintah kalurahan dalam mempercepat proses pembangunan di masyarakat.

Kalurahan Triwidadi Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari 10 kelembagaan termasuk LPMK, tetapi untuk keaktifannya hanya beberapa saja. Dalam kelembagaan ini masing-masing memiliki program-program yang berbeda. Untuk LPMK Triwidadi sendiri memiliki fokus utama pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, taluk, gedung dan fasilitas penunjang

lainnya dilingkungan kalurahan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang mengutamakan aksesibilitas dan sarana dasar yang mendukung aktivitas harian mereka. Dalam hal ini LPMK bekerja sama atau saling support antara lembaga-lembaga masyarakat lainnya seperti PKK dan Karang Taruna.

Menurut Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat Triwidadi yang bisa dikatakan sangat aktif dalam berbagai program yang dijalankan oleh LPMK hal ini menunjukkan adanya kesadaran, kerelaan dan kepedulian terhadap pembangunan di Kalurahan Triwidadi. Keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan dan program pembangunan seperti infrastruktur dan lainnya hal ini mencerminkan mereka semangat dalam bergotong royong. Masyarakat Triwidadi tidak hanya terlibat dalam tahap pelaksanaan tapi juga dalam tahap perencanaan, biasanya masyarakat yang mengusulkan pembangunan sehingga program-program yang dijalankan oleh LPMK dapat benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pembangunan kalurahan tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat saja tetapi juga pada ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, kualitas SDM yang baik memungkinkan masyarakat untuk paham atau memahami tujuan pembangunan, implikasi jangka panjang, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Dengan pemahaman ini, masyarakat menjadi lebih paham tentang manfaat program-program atau kegiatan yang ada di tengah mereka. Dengan SDM yang berkompeten dapat

menjadi sumber inovasi dan ide-ide baru dalam merancang pembangunan yang lebih maju serta memanfaatkan potensi dikalurahan.

Dalam pembangunan kalurahan, dukungan dari pemerintah sangatlah penting terutama terkait anggaran, regulasi dan kebijakan yang memungkinkan program pembangunan berjalan secara efektif. Pemerintah kalurahan memiliki peran sebagai fasilitator yang menyediakan sumber dana dan regulasi. Anggaran desa sering kali bersumber dari Dana Desa hal menjadi fondasi utama dalam membiayai program pembangunan yang ada. LPMK Triwidadi dalam menjalankan programnya memiliki anggaran sebesar Rp 6.000.000. yang diberikan oleh pemerintah kalurahan, dengan anggaran yang bisa dibilang cukup kecil ini LPMK sendiri tidak bergantung dari anggaran yang diberikan pemerintah, dari hasil yang didapatkan peneliti adanya sebuah inovatif yang dilakukan oleh LPMK ini yaitu membangun relasi (link) dengan adanya inovatif ini LPMK mendapatkan pendanaan untuk mendukung pembangunan di Kalurahan Triwidadi. Dengan adanya hal ini menjadikan LPMK Triwidadi itu produktif.

Meskipun LPMK sudah berjalan cukup lama dan bisa dikatakan produktif, Masih saja ada kendala yang sampe hari ini terjadi yaitu adanya tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya dibidang pembangunan, ketika LPMK diberikan wewenang untuk merencanakan pembangunan di kalurahan tetapi disisi lain di kalurahan juga mempunyai tim yaitu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang bersamaan dengan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBDJ) yang sama-sama membidangi bidang pembangunan, hal ini bisa

dikatakan membuat LPMK menjadi lembaga yang lemah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis partisipasi.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) merupakan organisasi yang diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia dengan tujuan utama meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa desa, yang dapat disebut dengan istilah lain, merupakan suatu entitas masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahan serta kepentingan warga berdasarkan inisiatif lokal, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar dapat berkembang menjadi entitas yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal ini bertujuan untuk membangun fondasi yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa secara adil dan makmur. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 lahir sebagai bentuk pengakuan kembali negara terhadap peran desa, yang sebelumnya lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penerapan asas rekognisi dan asas subsidiaritas dalam undang-undang ini menjadi bukti nyata upaya negara dalam mendorong kemandirian desa. Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur berbagai aspek, seperti kedudukan dan klasifikasi desa, tata kelola desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak serta kewajiban

desa dan masyarakatnya, pengelolaan keuangan dan aset desa, hingga pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Sebagai regulasi yang relatif baru, implementasi undang-undang ini terus mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan dinamika globalisasi dan modernisasi yang berlangsung saat ini. Pemberlakuan Undang-Undang Desa tentu membawa dampak, baik positif maupun negatif, bagi pemerintahan desa. Dampak positifnya adalah adanya pengakuan terhadap desa sebagai entitas yang memiliki hak dalam menentukan arah pembangunannya sendiri. Namun, di sisi lain, dampak negatif yang mungkin muncul adalah kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya desa yang dapat menghambat efektivitas penerapan kebijakan ini, sehingga berpotensi memperburuk kondisi desa jika tidak didukung dengan kesiapan yang memadai.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur berbagai aspek pemerintahan desa, termasuk mekanisme dan tanggung jawab LKD, di mana LPMK sebagai lembaga yang berperan di tingkat kelurahan memiliki dasar hukum yang kuat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang bersifat partisipatif. Secara khusus, ketentuan mengenai peran dan fungsi LPMK diatur dalam Pasal 150, 151, dan 152, yang menegaskan bahwa LPMK bertugas untuk membantu pemerintah kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

pembangunan, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berbasis pada kebutuhan nyata di tingkat akar rumput.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan percepatan peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan dan kelurahan. Pengaturan pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat kalurahan dan kelurahan yang adil, sejahtera, makmur, dan berdikari.

Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, menjelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 secara resmi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) adalah sebuah wadah partisipasi masyarakat yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat kalurahan. LKK di Kalurahan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki struktur

minimum yang meliputi beberapa komponen penting antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Rukun Tangga (RT), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan (TP PKK), Karang Taruna, dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Setiap komponen yang disebutkan diatas memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penguatan LPMK Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Yogyakarta?
2. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Penguatan LPMK Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Yogyakarta?

C. Fokus Penelitian

1. Strategi Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK).

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penguatan LPMK Triwidadi
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam perbuatan LPMK Triwidadi.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penulis mengharapkan adanya manfaat dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai acuan untuk memperkaya wawasan kaum intelektual terutama dalam mendapatkan gelar sarjana di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta yang berkaitan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) serta menjadi studi lanjut bagi pihak-pihak yang ingin mendalami jauh tentang permasalahan yang berkaitan dengan fokus permasalahan ini

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi bagi pemerintah desa khususnya LPMK terkait dengan penguatan LPMK Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul. Serta dapat memberikan sebuah informasi bagi kalangan yang ingin melakukan penelitian berikutnya.

F. Literatur Review

Pada dasarnya, penelitian mengenai LPMK bukanlah suatu hal yang baru, dalam penelitian-penelitian terdahulu pun sudah membahas mengenai LPMK.

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ganis Rana Meidityas, Asep Sumaryana Juli 2024 dengan judul “Kapasitas Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Upaya Pemberdayaan

Masyarakat Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut” Jurnal ini membahas mengenai kapasitas organisasi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di desa Tanjungsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, dalam upaya memperdaya masyarakat. Menjelaskan bahwa meskipun LPM memiliki struktur yang ada tetapi untuk fungsinya belum berjalan secara optimal. Masalah yang menonjol adalah kepemimpinan yang kurang efektif dalam mendorong atau mengajak masyarakat dalam berpartisipasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta anggaran yang sangat minim. Hal ini mengakibatkan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur dan tidak bersifat berkelanjutan sehingga dampaknya pada kesejahteraan masyarakat masih terbatas. LPM di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, penting adanya kerja sama atau kolaborasi antara LPM dan stekholder eksternal untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan. (Juli et al., 2024). Kesamaan dari penelitian atau jurnal diatas dengan penelitian peneliti terletak pada peran lembaga itu sendiri yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan perbedaanya terletak pada bagaimana peneliti sebelumnya lebih menekankan bahwa kurangnya kepemimpinan LPM dan kurangnya partisipasi dari masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur yang dijalankan kurang optimal. Sedangkan penelitian peneliti lebih menekankan kepada masalah tumpang tindih wewenang atau tugas dari LPMK, jika untuk partisipasi masyarakat triwidadi sudah cukup baik dalam

berpartisipasi untuk pelaksanaan pembangunan. Kepemimpinan LPMK triwidadi cukup baik dalam mengelola lembaganya dengan kemampuan kepemimpinan yang ada LPMK triwidadi mampu untuk mengelola program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

2. Dalam skripsi yang disusun oleh Bunga Delva Putri 2021 dengan judul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Membahas mengenai peran penting LPM sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan yang partisipatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fungsi LPM dalam mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Dapat ditarik hasil bahwa penelitian ini menunjukan bahwa meskipun LPM telah berperan sebagai fasilitator, mediator, dan dinamisator dalam pembangunan desa, masih terdapat masalah seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi LPM dan partisipasi gotong royong yang minim. (Putri, 2021). Kesamaan dari penelitian skripsi ini dengan penelitian peneliti yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sama-sama membahas mengenai peran penting LPM sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan yang partisipatif. Perbedaannya yaitu penelitian skripsi ini membahas tentang rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi LPM, serta kurangnya pemahaman mengenai persepsi masyarakat mengenai kegiatan pembangunan, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas mengenai adanya tumpang

tindih tugas oleh tim yang dibentuk dan juga LPMK dan LPMK yang mendapatkan anggaran yang kecil dalam pengelolaan program terutama dalam pembangunan. Perbedaan juga terletak pada tingkat pemahaman masyarakat triwidadi yang sudah baik dan mengerti akan pembangunan sehingga partisipasi masyarakat cukup tinggi.

3. Skripsi yang disusun oleh Putri Nirmala Valentine Laoli 2022 dengan judul “Pelaksanaan Pembangunan Desa Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKAL) Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul DIY”. Inti dari pembahasannya adalah pelaksanaan pembangunan desa secara prosedural maupun administrasi menyesuaikan regulasi yang berlaku, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut setiap wilayah memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam hal pembangunan desa, peranan institusi lokal merupakan salah satu unsur kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan. Namun kenyataan di lapangan tampak berbeda. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dianggap sekedar lembaga yang membantu pemerintah desa, sehingga setiap pergantian kepemimpinan kepala desa maka fungsi lembaga tidak jalan dengan baik bahkan mati suri. (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019). Persamaan dari penelitian skripsi ini dan penelitian peneliti adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha untuk melakukan penelitian, menyajikan, menggambarkan, menganalisa serta menyimpulkan data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, serta sama-sama membahas mengenai LPMK yang

menjadi lembaga yang membantu pemerintah dalam hal perencanaan pembangunan.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian skripsi ini permasalahannya ialah LPMK yang tidak aktif atau mati suri karena setiap pergantian kepemimpian maka LPMK juga menjadi lemah karena ketergantungan kepada pergantian kepemimpinan. Sedangkan pada penelitian peneliti LPMK triwidadi sudah berjalan cukup lama tidak ada interfensi dari adanya pergantian kepemimpinan sehingga LPMK triwidadi berusaha menjadi lembaga yang aktif dalam menerima aspirasi masyarakat serta inovatif dalam kapasitasnya untuk memajukan kalurahan.

4. Dalam jurnal ilmu pemerintahan yang ditulis oleh M. Wahyu Arbain 2014 berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lpmk) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kebupaten Kutai Kartanegara”. Kesimpulan penelitian ini bahwa LPMK di Kalurahan Muara Jawa Tengah berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan LPMK juga menjalankan peran dan fungsinya secara aktif serta berupaya mengembangkan kualitas SDM melalui berbagai program pelatihan dan ketrampilan. Dengan peran LPMK ini membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberdayakan mereka agar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Namun, efektivitas LPMK masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti kurangnya dukungan dan koordinasi dengan pemerintah serta pihak perusahaan. Seringkali, perusahaan tidak sepenuhnya kooperatif

dalam bekerja sama dengan LPMK, yang menghambat pelaksanaan program-program pelatihan dan pengembangan SDM. Selain itu, masyarakat sendiri cenderung kurang berinisiatif dalam ikut serta dalam program gotong royong atau kegiatan pemberdayaan, yang menyebabkan ketergantungan terhadap LPMK dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antara LPMK, pemerintah, dan perusahaan, serta upaya untuk membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan di Kelurahan Muara Jawa Tengah. (Arbain, 2014). Persamaan antara jurnal dan penelitian peneliti yaitu, sama-sama membahas mengenai LPMK serta peranan aktif dari LPMK itu sendiri dalam membantu meningkatkan partisipasi dalam pembangunan dan, sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian peneliti membahas mengenai masyarakat triwidadi yang cukup aktif dalam berpartisipasi dan mempunyai kerelaan dalam gotong royong untuk setiap program-program yang diadakan, hanya saja dukungan anggaran dari pemerintah masih terbilang kecil dan juga karena adanya terbentuknya tim-tim yang sama-sama membidangi bidang pembangunan. Sedangkan dalam penelitian jurnal ini mempunyai Kendal yaitu kurang aktif atau inisiatif masyarakat dalam pertisipasi dan gotong royong dalam program kegiatan serta, kurangnya koordinasi dan dukungan dari pemerintah kalurahan.

5. Dalam tulisan Damaiwana1 dan Ahmad Saleh1 2020 dengan Judul Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lpmk) Dalam

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Kelurahan Mamasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LPMK dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Mamasa. Berdasarkan penelitian yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif, ditemukan bahwa peran LPMK belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Beberapa masalah yang diidentifikasi adalah tidak adanya jadwal rapat yang jelas dengan kepala lingkungan, sehingga aspirasi masyarakat tidak tersampaikan dengan efektif. Selain itu, LPMK kurang proaktif dalam pembangunan fisik, sering kali pembangunan dialihkan ke pihak ketiga (kontraktor), padahal seharusnya menjadi kewenangan LPMK. Partisipasi masyarakat pada proses pembangunan juga masih rendah. Banyak masyarakat tidak ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan hanya mengikuti keputusan tanpa aktif terlibat. Serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gotong royong dan rendahnya tingkat pendidikan. (Damaiwana & Saleh, 2021). Persamaan dari penelitian peneliti dan penulisan ini adalah sama-sama menganalisis peran LPMK dalam menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian peneliti dalam pembahasan menjelaskan bahwa LPMK triwidadi sudah optimal dalam menjalankan tugasnya, seperti mendengarkan aspirasi masyarakat dan partisipasi

masyarakat yang cukup tinggi yang membuat masyarakat mempunyai rasa kerelaan untuk saling membantu dalam pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan dalam penelitian penulisan ini LPMK masih kurang optimal dalam menjalankan tugasnya, serta dalam pengerjaan program LPMK menyerahkan kepada pihak ketiga atau kontraktor hal inilah membuat masyarakat kurang aktif dalam program pembangunan maupun dalam musyawarah bersama.

6. Dalam jurnal yang ditulis oleh Itsnaini Iflachatun Azkiya, Hendra Dedi Kriswanto 2024 yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat”. Penelitian ini menjelaskan bahwa LPMK memiliki peran sentral sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator. Sebagai fasilitator, LPMK menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sebagai mediator, mereka menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan memastikan transparansi program yang diadakan. Peran motivator mereka terlihat dalam upaya menggerakkan minat masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan, sementara sebagai dinamisator, LPMK menyesuaikan dan mengawasi kegiatan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang dibahas ialah rendahnya partisipasi masyarakat hal ini terjadi karena LPMK Kelurahan Candi vakum beberapa tahun, serta terbatasnya dana menurut LPMK untuk menjalankan program-program memerlukan dana yang cukup. Melalui peran sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator, LPMK

berupaya mengajak masyarakat untuk lebih terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat yang terbangun baru berada pada tingkat "Degrees of Tokenism" menurut tangga partisipasi Arnstein. Pada level ini, meskipun masyarakat dapat menyuarakan aspirasi mereka, keputusan akhir masih berada di tangan pemerintah atau pihak LPMK, sehingga keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya optimal. (Azkiya & Kriswanto, 2024, JP2M). Persamaan dari penelitian peneliti dan jurnal ini adalah pembahasan yang sama mengenai peran LPMK sebagai penggerak partisipasi masyarakat, sama-sama menyinggung mengenai anggaran yang terbatas dan, juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah dalam jurnal ini, tingkat partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat "Degrees of Tokenism" menurut tangga partisipasi Arnstein, yang berarti masyarakat hanya bisa memberikan saran namun keputusan akhir berada di tangan pemerintah. Sementara dalam penelitian peneliti masyarakat sudah berada pada tingkat partisipasi yang lebih tinggi, yang ditandai dengan partisipasi aktif dan pengambilan keputusan bersama dalam perencanaan serta pelaksanaan program atau kegiatan.

7. Dalam jurnal yang ditulis oleh Exzax Isyabillilah, Fulia Aji Gustaman 2023 berjudul "Implementasi Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Taman Kota Madiun". Membahas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) menunjukkan bahwa

LPMK merupakan wadah penting bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pemberdayaan. Berdasarkan kajian di Kelurahan Taman, Kota Madiun, program kerja LPMK dibagi ke dalam tiga bidang utama, yaitu ekonomi dan pembangunan, pendidikan, serta sosial budaya dan pemberdayaan. Pelaksanaan program di bidang-bidang ini menargetkan peningkatan keterampilan, kesejahteraan ekonomi, dan partisipasi sosial. Meski adanya kendala seperti keterbatasan dana dan dukungan sumber daya, LPMK tetap menjalankan beberapa program pemberdayaan, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam implementasinya. Partisipasi masyarakat yang rendah penyebabnya ada beberapa hal antaranya kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif antara LPMK dan masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya memahami program-program yang dijalankan, sehingga tingkat antusiasme dan keterlibatan mereka pun rendah. Selain itu, LPMK belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, yang dapat memengaruhi kesadaran warga tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan. (Isyabillilah & Gustaman, 2023). Persamaan antara penelitian peneliti dan jurnal ini adalah sama-sama membahas mengenai LPMK yang menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini dalam pembahasannya menjelaskan bahwa program kerja LPMK dibagi menjadi 3 bagian dengan

fokus dan target yang berbeda meskipun begitu dalam mengimplementasikannya masih belum optimal serta, partisipasi masyarakat yang masih kurang karena tidak adanya sosialisasi untuk setiap program-program. Dalam penelitian peneliti LPMK triwidadi hanya di fokuskan pada satu bidang yaitu pembangunan infrastruktur meskipun begitu bidang pembangunan non fisik juga LPMK triwidadi berperan untuk mengelolanya. Dalam pembangunan seperti jalan dan lainnya partisipasi atau keikut sertaan masyarakat sangat tinggi dan dimana setiap program pembangunan dilakukan dengan mensertakan masyarakat didalamnya, adapun setiap proses perencanaan masyarakat yang akan mengusulkan kebutuhan pembangunan mereka ke LPMK lalu LPMK akan menyalurkannya ke kalurahan.

G. Kerangka Konseptual

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan berfungsi sebagai mitra pemerintah kalurahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan di tingkat kalurahan. LPMK lahir dari kebutuhan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan, serta mengoptimalkan potensi lokal yang ada di lingkungan kalurahan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, disebutkan

bahwa LPMK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang bertugas membantu pemerintah kalurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dan partisipasi masyarakat. Melalui LPMK, masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan, mengusulkan program prioritas, serta terlibat dalam pengawasan jalannya pembangunan tersebut. Secara konseptual, LPMK dapat dipandang sebagai perwujudan dari prinsip pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang berdaya, berinisiatif, dan bertanggung jawab atas kemajuan wilayahnya sendiri. Robert Chambers (Alfitri, 2011:22), seorang pakar dalam upaya pemberdayaan masyarakat, mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan, yang berpusat pada manusia (*people centered*), partisipatif (*participatory*), memberdayakan (*empowering*), dan berkelanjutan (*sustainable*). Dalam perspektif ini, LPMK menjadi forum yang mengorganisasikan kekuatan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Pembentukan LPMK didasarkan pada kebutuhan untuk membangun kesadaran kolektif dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan. Oleh karena itu, LPMK berfungsi

tidak hanya dalam aspek administratif sebagai mitra kalurahan, tetapi juga dalam aspek sosial, dengan membangun solidaritas, gotong royong, serta rasa memiliki terhadap setiap proses pembangunan yang berlangsung. Dengan demikian, keberadaan LPMK menjadi penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel di tingkat lokal. Dalam praktiknya, LPMK berperan untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup penyusunan rencana pembangunan berbasis masyarakat, pelaksanaan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi, penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan, serta fasilitasi dalam program-program kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Dengan fungsi-fungsi ini, LPMK tidak hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah kalurahan, tetapi juga sebagai motor penggerak aspirasi dan inisiatif masyarakat. Di samping itu, LPMK juga memiliki peran strategis dalam mempererat hubungan antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat. Sebagai lembaga yang lahir dari masyarakat, LPMK mampu menerjemahkan kebutuhan riil masyarakat kepada pemerintah serta menyosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat dengan cara yang lebih efektif dan partisipatif. Oleh karena itu, LPMK berfungsi sebagai jembatan komunikasi dua arah yang vital untuk memperkuat hubungan harmonis antara negara dan warga negara di tingkat lokal. Keberadaan LPMK juga tidak lepas dari prinsip-prinsip *good*

governance, terutama dalam aspek partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Dalam konteks ini, LPMK diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan pelibatan yang aktif tersebut, diharapkan hasil pembangunan menjadi lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, efektivitas LPMK dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain kapasitas sumber daya manusia yang mengelola LPMK, tingkat partisipasi masyarakat, dukungan dari pemerintah kalurahan, serta keberadaan regulasi yang mendukung operasionalisasi LPMK. Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, keberadaan LPMK dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas belaka tanpa mampu mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, upaya penguatan LPMK perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui peningkatan kapasitas pengurus, pembentukan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, maupun melalui penyusunan program-program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam jangka panjang, LPMK yang kuat dan efektif akan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan kalurahan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan Dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)

Tujuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) pada dasarnya adalah untuk mendorong masyarakat agar berdaya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan di tingkat kelurahan. LPMK bertujuan menciptakan masyarakat yang mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan, sekaligus meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki. Secara umum, tujuan LPMK adalah untuk memperkuat keberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat menjadi subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan, di mana pembangunan dilaksanakan berbasis pada aspirasi, kebutuhan, dan potensi lokal. Melalui peran aktif masyarakat yang difasilitasi oleh LPMK, diharapkan tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Selain itu, LPMK bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat. Dengan adanya LPMK, proses komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi lebih efektif, sehingga keputusan-keputusan pembangunan lebih partisipatif dan inklusif. Tujuan lain yang tidak kalah penting adalah membangun solidaritas dan semangat gotong royong dalam komunitas kalurahan, guna memperkuat kebersamaan dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) adalah sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam pembangunan kalurahan, dengan menjalankan peran-peran penting yang bertujuan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. LPMK bertindak sebagai fasilitator, mediator, dan motor penggerak dalam berbagai aktivitas pembangunan berbasis komunitas. Berikut ini fungsi LPMK meliputi:

- a. Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat. LPMK berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan masalah yang ada di masyarakat, kemudian merumuskan rencana pembangunan kelurahan berdasarkan hasil musyawarah warga.
- b. Penggerakan partisipasi dan gotong royong masyarakat. LPMK bertugas mengorganisasikan warga agar terlibat aktif dalam setiap tahapan pembangunan, baik melalui swadaya tenaga, dana, maupun ide, sehingga pembangunan menjadi milik bersama.
- c. Penyaluran aspirasi masyarakat. LPMK menjadi wadah resmi untuk menyalurkan pendapat, keluhan, dan usulan dari masyarakat kepada pemerintah kelurahan, sehingga terjadi dialog dua arah yang konstruktif.
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. LPMK berfungsi mengawal jalannya program pembangunan agar berjalan sesuai rencana, transparan, dan akuntabel, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
- e. Pengembangan potensi masyarakat. Melalui berbagai program pembinaan dan pelatihan, LPMK membantu meningkatkan kapasitas

individu dan kelompok di masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, LPMK diharapkan mampu memperkuat keberdayaan masyarakat, mempercepat pencapaian pembangunan yang inklusif, dan menjaga keberlanjutan hasil-hasil pembangunan. LPMK tidak hanya sekadar menjadi lembaga administratif, melainkan menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang lebih mandiri, berdaya, dan sejahtera.

3. Penguatan

Penguatan organisasi merupakan salah satu strategi penting yang harus dilakukan organisasi dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu sehubungan dengan perkembangan kemajuan yang terjadi, Organisasi dituntut untuk mampu mengatasi permasalahan yang timbul sejalan dengan perkembangan. Milen (2003:21) mengatakan bahwa “penguatan organisasi memfokuskan pengembangan hampir seluruhnya mengenai permasalahan sumber daya manusia, proses dan struktur organisasi”. Menurut Grindle (1997:9) dalam dimensi penguatan organisasi terdapat beberapa jenis-jenis aktivitas yang meliputi kepemimpinan, budaya organisasi, dan komunikasi. Dengan demikian, organisasi berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia, proses dan struktur organisasi untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kebutuhan masyarakat.

Penguatan (*reinforcement*) atau memperkuat adalah proses, cara, perbuatan memperkokoh, menguati atau menguatkan untuk meningkatkan sesuatu hal. Menurut Milen dalam Rozaki, dkk, (2005:115-116) penguatan kapasitas organisasi di level desa adalah sebuah proses berkelanjutan, dimana individu, kelompok, organisasi dan masyarakat meningkatkan kemampuannya untuk: (1) menjalankan fungsi pokok, memecahkan masalah dan mencapai tujuan organisasi; (2) memahami dan menghubungkan kebutuhan pengembangan mereka dalam konteks yang lebih luas dengan cara yang berkelanjutan. (Milen dalam Rozaki dkk., 2024:9). Penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan (LPMK) merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga dalam melayani masyarakat. Lembaga ini berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, serta memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi lokal. Dengan penguatan yang tepat, lembaga ini dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui program-program yang terencana, lembaga ini berupaya untuk memberdayakan warga, meningkatkan keterampilan, dan menciptakan peluang ekonomi. Penguatan LPMK membantu memastikan bahwa program-program ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Penguatan LPMK harus dimulai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Pelatihan dan pengembangan

keterampilan bagi pengurus dan anggota LPMK menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan program pemberdayaan secara efektif. Dengan pelatihan yang tepat, mereka dapat memahami manajemen organisasi, pengembangan proyek, serta teknik komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan masyarakat. Ini akan menciptakan tim yang lebih profesional dan mampu mengelola program-program dengan lebih efisien.

Penting untuk merumuskan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, LPMK dapat melakukan survei dan diskusi dengan warga untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta potensi yang ada. Dengan begitu, program-program yang dirancang tidak hanya relevan tetapi juga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Misalnya, program pelatihan keterampilan yang berfokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari segi kolaborasi, LPMK perlu menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini tidak hanya akan membuka akses terhadap sumber daya tambahan, tetapi juga memperluas jaringan dukungan bagi program-program yang dilaksanakan. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, LPMK dapat memperkuat posisi tawar mereka dalam mendapatkan dukungan finansial dan teknis, serta

memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman yang bermanfaat. Selain itu Monitoring dan Evaluasi juga merupakan aspek krusial dalam penguatan LPMK. Dengan menetapkan indikator keberhasilan yang jelas, LPMK dapat mengevaluasi efektivitas program yang dijalankan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Proses evaluasi yang melibatkan masyarakat akan memberikan umpan balik yang konstruktif, sehingga program dapat terus disempurnakan. Ini penting untuk memastikan bahwa lembaga tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

4. Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)

Struktur lembaga merupakan komponen penting dalam keberlangsungan dan efektivitas suatu organisasi. Dalam teori kelembagaan klasik, Soetandyo Wignjosoebroto (1995) menjelaskan bahwa lembaga adalah sistem norma atau aturan yang dilembagakan, yang tidak hanya mengatur perilaku sosial tetapi juga menyusun pola hubungan antar bagian dalam sebuah organisasi. Struktur lembaga berfungsi untuk mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan hubungan antar posisi dalam organisasi tersebut.

Struktur yang baik memungkinkan lembaga menjalankan fungsi sosial, politik, maupun administratif secara efektif. Dalam lembaga sosial, termasuk lembaga pemerintahan tingkat lokal seperti di kalurahan, struktur mencerminkan bagaimana fungsi-fungsi kelembagaan dilaksanakan melalui pengaturan posisi dan hubungan kerja antara individu atau kelompok dalam

lembaga tersebut. Dengan adanya struktur yang jelas, lembaga dapat menjalankan perannya secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa struktur yang kokoh dan tertata, lembaga cenderung tidak stabil dan tidak mampu menjalankan fungsi sosial dan pelayanan publik secara optimal.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah kalurahan dan merupakan mitra strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Sebagai lembaga kemasyarakatan, LPMK memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk menjalankan tugasnya sebagai wadah partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kalurahan. Struktur organisasi LPMK umumnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang juga diterapkan dalam konteks kalurahan di wilayah DIY. Struktur LPMK meliputi unsur pengurus inti dan pelaksana kegiatan, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua: Bertugas memimpin jalannya organisasi dan menjadi juru bicara LPMK dalam koordinasi dengan pemerintah kalurahan.
- b. Wakil Ketua: Membantu ketua serta menggantikan peran ketua saat berhalangan.
- c. Sekretaris: Mengelola administrasi, surat menyurat, dan dokumentasi kegiatan LPMK.

- d. Bendahara: Mengelola keuangan dan anggaran LPMK secara transparan dan akuntabel.
- e. Seksi-seksi atau Bidang: Dibentuk sesuai kebutuhan, misalnya bidang pemberdayaan ekonomi, sosial, pendidikan, lingkungan, dan sebagainya.

Struktur ini bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Kejelasan struktur sangat menentukan efektivitas kerja LPMK. Jika struktur tidak jelas, maka pembagian peran menjadi kabur, koordinasi sulit dilakukan, dan fungsi lembaga bisa terganggu. Selain itu, keberadaan struktur juga memungkinkan terjadinya system checks and balances dalam pelaksanaan kegiatan. Misalnya, bendahara tidak hanya bertugas menyimpan dana, tetapi juga wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang kemudian diawasi oleh anggota LPMK lainnya dan pemerintah kalurahan. Struktur LPMK juga menjadi dasar penting dalam menjalin hubungan kelembagaan, baik secara vertikal (dengan pemerintah kalurahan dan kabupaten) maupun horizontal (dengan lembaga lain seperti BPD, Karang Taruna, dan PKK). Melalui struktur yang kuat dan jelas, LPMK dapat menjadi aktor utama dalam mendorong partisipasi masyarakat, menyusun perencanaan pembangunan, serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal.

5. Fungsi dan Peran LPMK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) memiliki fungsi strategis dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang

berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Program pemberdayaan ditempatkan pada lokasi yang strategis dan mudah diakses masyarakat. Lingkungan yang dibentuk melalui pembangunan masyarakat harus mempunyai kondisi yang menonjolkan persahabatan, jauh dari kondisi birokratis, dan tidak adanya tekanan (Arthawati & Mevlillah, 2023).

Sebagai lembaga yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, LPMK bertugas memastikan bahwa program pemberdayaan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan dan memperkuat kapasitas masyarakat. Pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan oleh LPMK dimulai dari proses identifikasi kebutuhan masyarakat. LPMK harus mampu melakukan pemetaan sosial untuk mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi masyarakat serta potensi yang dapat dikembangkan. Proses ini biasanya dilakukan melalui musyawarah warga, survei kebutuhan, atau forum diskusi partisipatif lainnya. Dengan pendekatan tersebut, program-program yang dirancang akan lebih akurat dan relevan. Setelah kebutuhan masyarakat teridentifikasi, LPMK berperan dalam merancang program pemberdayaan yang konkret. Program tersebut bisa berupa pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi berbasis usaha mikro, pembinaan kelompok tani, pengembangan koperasi lokal, pendidikan literasi keuangan, atau program kesehatan berbasis masyarakat. Intinya, program-program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih mandiri, produktif, dan mampu mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Dalam tahap

pelaksanaan, LPMK bertugas mengorganisasi sumber daya yang tersedia, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun dukungan dari pemerintah atau sektor swasta. LPMK berperan menggerakkan partisipasi masyarakat agar mereka terlibat aktif dalam menjalankan program. Selain itu, LPMK juga bertanggung jawab memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada hasil yang dapat diukur. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan program. LPMK wajib melakukan evaluasi terhadap setiap program pemberdayaan yang dijalankan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak program terhadap peningkatan kapasitas masyarakat. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan program-program berikutnya. Dengan itu, fungsi LPMK dalam melaksanakan program pemberdayaan tidak hanya berhenti pada tahap pelaksanaan teknis, tetapi mencakup seluruh siklus program mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Melalui peran ini, LPMK menjadi ujung tombak dalam menciptakan masyarakat kalurahan yang berdaya, mandiri, dan mampu mengelola pembangunan berbasis kekuatan sendiri.

Selain menjalankan program-program pemberdayaan, LPMK memiliki peran sentral dalam penyusunan rencana pembangunan di tingkat kalurahan. Penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, LPMK berfungsi sebagai perantara antara

masyarakat dengan pemerintah kalurahan. LPMK bertugas mengumpulkan aspirasi, kebutuhan, serta usulan-usulan pembangunan dari warga masyarakat melalui forum-forum musyawarah. Aspirasi ini kemudian diolah menjadi bahan utama dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) maupun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) tahunan.

Peran LPMK dalam proses perencanaan meliputi beberapa aspek penting:

- a. LPMK melakukan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat. Informasi ini meliputi masalah kemiskinan, ketertinggalan infrastruktur, kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta potensi lokal yang bisa dikembangkan.
- b. LPMK mengorganisir forum musyawarah masyarakat untuk membahas prioritas pembangunan. Forum ini menjadi wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka tentang arah pembangunan di wilayah kalurahan.
- c. LPMK berperan dalam penyusunan daftar prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan paling mendesak dan potensi yang tersedia. Daftar prioritas ini disusun secara transparan dan akuntabel untuk kemudian diusulkan kepada pemerintah kalurahan.
- d. LPMK ikut serta dalam proses pengawasan perencanaan agar program-program yang telah diusulkan benar-benar diakomodasi dalam dokumen perencanaan resmi kalurahan. Dalam hal ini, LPMK bertugas

memastikan bahwa prinsip partisipatif tetap dijaga, sehingga keputusan pembangunan tidak hanya diambil secara top-down, melainkan benar-benar berdasarkan hasil musyawarah masyarakat.

Dalam pelaksanaan perannya, LPMK harus mampu menjembatani berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Tidak jarang muncul perbedaan kepentingan atau prioritas antar kelompok masyarakat. LPMK harus memainkan peran sebagai mediator yang adil, sehingga semua suara masyarakat dapat terwakili dalam rencana pembangunan. Optimalisasi peran LPMK dalam perencanaan pembangunan juga bergantung pada kapasitas sumber daya manusia di dalamnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas anggota LPMK dalam bidang perencanaan pembangunan partisipatif, teknik fasilitasi musyawarah, serta manajemen data menjadi sangat penting. Dengan mengoptimalkan peran dalam penyusunan rencana pembangunan, LPMK dapat memastikan bahwa pembangunan di tingkat kalurahan berjalan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta mendorong terciptanya pembangunan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

6. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) sebagai lembaga yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat, sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. Kapasitas pengurus LPMK menjadi faktor kunci dalam memastikan program-program pemberdayaan berjalan efektif

dan tujuan pembangunan kalurahan tercapai. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperkuat melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, LPMK bertugas menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Agar tugas ini dapat terlaksana dengan baik, pengurus LPMK harus memiliki kemampuan manajerial, teknis, dan sosial yang memadai. Tanpa kapasitas yang baik, potensi peran LPMK dalam pembangunan akan sulit terwujud. Robert Chambers (1995) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat memerlukan pendukung yang memiliki kapasitas untuk memfasilitasi, bukan hanya mengarahkan.

Salah satu cara utama dalam meningkatkan kapasitas SDM pengurus LPMK adalah melalui penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), dan pendidikan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengurus pengetahuan praktis dan teoritis dalam mengelola lembaga serta memberdayakan masyarakat.

a. Pelatihan

Pelatihan yang diberikan kepada pengurus LPMK mencakup berbagai bidang seperti teknik penyusunan rencana pembangunan partisipatif, teknik fasilitasi musyawarah, manajemen proyek komunitas, serta teknik pelaporan administrasi dan keuangan. Pelatihan ini dirancang berbasis pada kebutuhan spesifik yang dihadapi oleh pengurus dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Menurut pendapat Siagian (2002), pelatihan adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi kerja seseorang agar mampu menjalankan tugas-tugasnya secara lebih efektif. Dalam konteks LPMK, pelatihan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membangun kepekaan sosial pengurus terhadap dinamika masyarakat.

b. Bimbingan Teknis (Bimtek)

Bimbingan teknis merupakan bentuk pendampingan teknis secara langsung kepada pengurus dalam menjalankan tugas-tugas operasional. Bimtek biasanya dilakukan oleh tenaga ahli dari dinas terkait, lembaga pemerintah, atau konsultan pembangunan masyarakat. Melalui bimtek, pengurus LPMK memperoleh pemahaman tentang standar prosedur pelaksanaan program pemberdayaan, regulasi terbaru, serta teknik-teknik pemberdayaan yang efektif. Bimtek juga memungkinkan terjadinya diskusi langsung antara pengurus dan narasumber, sehingga permasalahan teknis di lapangan dapat segera dipecahkan.

c. Pendidikan Berkelanjutan

Pendidikan berkelanjutan dalam konteks LPMK meliputi program pendidikan nonformal seperti kursus kepemimpinan komunitas, pendidikan demokrasi lokal, serta pengembangan literasi digital untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas program. Tujuan pendidikan berkelanjutan ini adalah untuk memperluas wawasan pengurus mengenai praktik-praktik pembangunan komunitas yang baik (*good community development practices*).

Peningkatan kapasitas pengurus LPMK tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga harus menyentuh aspek manajerial dan sosial. Kedua aspek ini sangat penting agar pengurus mampu mengelola organisasi dengan baik sekaligus membangun hubungan harmonis dengan masyarakat.

a. Kemampuan Manajerial atau Manajemen

Kemampuan manajerial atau manajemen yang perlu dimiliki pengurus LPMK meliputi:

- 1) Perencanaan: Menyusun rencana kerja berdasarkan hasil musyawarah masyarakat.
- 2) Organisasi: Mengatur pembagian tugas dan fungsi antar pengurus.
- 3) Penggerakan: Memotivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam program pembangunan.
- 4) Pengendalian: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang dijalankan.

Menurut Henry Fayol (dalam Handoko, 2003), fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Oleh karena itu, kemampuan ini harus dibangun melalui pelatihan intensif dan pengalaman lapangan yang terus-menerus.

b. Kemampuan Sosial

Selain aspek manajerial, pengurus LPMK juga harus memiliki kemampuan sosial yang kuat. Kemampuan ini mencakup:

- 1) Komunikasi efektif: Mampu menyampaikan ide dan informasi kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami.
- 2) Fasilitasi: Mampu memimpin musyawarah dengan partisipatif, mendorong keterlibatan semua elemen masyarakat.
- 3) Membangun jejaring: Menjalin hubungan baik dengan lembaga lain, pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung program pemberdayaan.

Kemampuan sosial menjadi penting karena dalam praktiknya, pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada hubungan interpersonal yang harmonis.

Sumber daya manusia (SDM) masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program pemberdayaan di tingkat kalurahan. pengertian sumber daya manusia secara luas mencakup mereka yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi dan mereka yang keterampilannya perlu dilatih dan dikembangkan, baik dalam organisasi maupun bisnis (Sari Pascariati Kasman, 2021). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal tanpa keterlibatan aktif dan kesiapan kapasitas masyarakat sebagai subjek pembangunan. Secara umum, sumber daya manusia masyarakat mengacu pada keseluruhan potensi, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki oleh individu-individu dalam komunitas kalurahan. Potensi ini meliputi aspek pengetahuan, keterampilan teknis, sikap sosial, serta kemampuan untuk

berorganisasi dan berpartisipasi dalam pembangunan. Salah satu aspek mendasar dari kualitas SDM masyarakat adalah tingkat kesadaran dan kepedulian sosial terhadap pembangunan kalurahan. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan akan lebih mudah diajak berkolaborasi dalam program-program LPMK. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban bersama seluruh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi bersikap pasif, melainkan aktif mengidentifikasi kebutuhan, mengusulkan program, hingga turut mengawasi pelaksanaannya. Selain itu, kemampuan berorganisasi dalam komunitas menjadi indikator penting dari kualitas SDM masyarakat. Masyarakat yang terbiasa berorganisasi, baik dalam bentuk kelompok-kelompok formal seperti kelompok tani, karang taruna, maupun organisasi perempuan, menunjukkan adanya kapasitas sosial yang kuat. Kemampuan ini sangat mendukung upaya LPMK dalam menghimpun kekuatan kolektif untuk mendorong berbagai program pemberdayaan. Organisasi-organisasi lokal ini juga menjadi media penting untuk membangun kepemimpinan warga, memperkuat solidaritas sosial, serta melatih keterampilan berkomunikasi dan bernegosiasi.

Pendidikan formal dan keterampilan teknis juga menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang SDM masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi sejauh mana mereka dapat memahami kebijakan pembangunan, berpartisipasi dalam

perencanaan, serta mengelola program-program yang berbasis pada kebutuhan lokal. Masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih kritis, kreatif, dan inovatif dalam mengusulkan dan menjalankan program pemberdayaan. Demikian pula, keterampilan teknis seperti pertanian, kerajinan, teknologi informasi, dan manajemen usaha menjadi modal penting yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program LPMK. Meskipun demikian, realitas di banyak kalurahan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih menjadi tantangan serius. Banyak masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, dan keterampilan teknis yang mereka miliki pun seringkali tidak sesuai dengan tuntutan pembangunan modern. Kondisi ini menyebabkan rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program pembangunan, karena keterbatasan pemahaman terhadap tujuan dan mekanisme pelaksanaan program. Di sinilah pentingnya peran LPMK untuk mendorong program-program peningkatan kapasitas masyarakat, baik melalui pelatihan, penyuluhan, maupun pendidikan non-formal. Selain aspek pendidikan, faktor budaya lokal juga mempengaruhi kualitas SDM masyarakat. Budaya gotong royong, musyawarah untuk mufakat, serta nilai-nilai solidaritas sosial yang masih kuat di sebagian besar kalurahan di Indonesia menjadi modal sosial yang sangat berharga. Modal sosial ini perlu dipertahankan dan dikembangkan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, budaya yang cenderung pasif, feodal, atau kurang terbuka terhadap perubahan dapat menjadi hambatan

dalam meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LPMK perlu memperhatikan karakteristik budaya lokal agar pendekatan yang digunakan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Pengembangan SDM masyarakat dalam hal pemberdayaan melalui LPMK tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan proses yang berkelanjutan. Masyarakat perlu diajak berdialog tentang kondisi sosial mereka, diberi ruang untuk mengungkapkan pandangan, serta didorong untuk bersama-sama merancang solusi atas permasalahan yang ada. Dialog yang sejajar ini bertujuan untuk membangun rasa percaya diri, rasa memiliki, dan komitmen terhadap perubahan yang dihasilkan.

Usman (1995) menjelaskan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) merupakan "upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat". Dalam konteks ini, pemberdayaan secara implisit mencakup unsur "partisipasi" yang seharusnya muncul dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan memberikan dorongan kepada individu atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka dapat berperan aktif dalam proses pembangunan. Ini menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, memungkinkan mereka untuk mengambil peran aktif dalam membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri. Dalam hal ini, SDM masyarakat yang kuat akan sangat menentukan keberhasilan

pendekatan partisipatif tersebut. Masyarakat yang berdaya tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi juga mampu mengelola, memelihara, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara mandiri.

Berbagai upaya konkret dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM masyarakat dalam mendukung LPMK. Salah satunya adalah melalui pelatihan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Pelatihan ini bisa mencakup berbagai bidang seperti keterampilan pertanian organik, pengelolaan keuangan mikro, teknologi tepat guna, atau manajemen usaha kecil. Selain itu, penyuluhan tentang hak-hak masyarakat, tata kelola pemerintahan desa, serta penguatan nilai-nilai demokrasi lokal juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Selain pelatihan, program mentoring dan pendampingan oleh fasilitator yang kompeten juga menjadi strategi penting. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat berlangsung secara efektif, serta untuk membantu masyarakat mengatasi berbagai hambatan yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

Penguatan SDM masyarakat juga perlu didukung oleh kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, seperti alokasi anggaran yang memadai untuk program pemberdayaan, kemudahan akses terhadap informasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Pemerintah kalurahan dan pihak-pihak terkait lainnya harus memiliki komitmen untuk menjadikan pengembangan SDM masyarakat sebagai prioritas dalam agenda

pembangunan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia masyarakat merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan LPMK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tanpa masyarakat yang memiliki kapasitas yang memadai, program-program pemberdayaan yang dijalankan LPMK akan sulit mencapai tujuannya.

7. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen yang sangat krusial dalam keberhasilan pembangunan berbasis komunitas. Dalam hal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas keterlibatan fisik, melainkan juga mencakup keterlibatan emosional, intelektual, dan sosial dalam setiap tahapan pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk nyata dari demokrasi di tingkat lokal, dimana masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya. Dalam literatur pembangunan, partisipasi masyarakat sering kali dipandang sebagai indikator utama keberhasilan program. Definisi mengenai partisipasi masyarakat dijelaskan oleh Gaventa dan Valderama, 2004 (Jamil & Bahua, 2010) bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi itu sendiri dari sekedar kepedulian menjadi penerima bantuan menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai macam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan. Definisi ini sejalan dengan pendapat Slamet, 2003 bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai bentuk ikut serta masyarakat dalam

pembangunan, kegiatan-kegiatan pembangunan, bahkan serta memanfaatkan dan menikmati hasil dari pembangunan (Jamil & Bahua, 2010).

Partisipasi dalam perencanaan pembangunan kalurahan mencerminkan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses identifikasi masalah, penentuan prioritas, serta penyusunan rencana program yang sesuai dengan kebutuhan riil. Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) merupakan forum utama di mana partisipasi masyarakat diartikulasikan. Dalam forum tersebut, warga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan gagasan kreatif yang dapat memperkaya rencana pembangunan. Partisipasi dalam tahap ini bersifat strategis, karena menentukan arah kebijakan pembangunan kalurahan selama satu tahun anggaran berjalan. Selain dalam tahap perencanaan, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam tahap pelaksanaan program-program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap program tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Pelibatan ini dapat berbentuk kerja bakti, gotong royong, kontribusi material, ataupun dukungan moral terhadap program-program yang diinisiasi oleh LPMK. Misalnya, dalam pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, ataupun talud, kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga kerja dan bahan material sangat membantu dalam mengurangi biaya pembangunan serta mempererat solidaritas sosial. Terdapat faktor-faktor

pendukung partisipasi masyarakat yang dipaparkan oleh Hendrawati Hamid, 2018 diantaranya: 1) Adanya kesempatan, kondisi lingkungan yang disadari memberikan peluang untuk berpartisipasi; 2) Adanya kemauan, adanya suatu dorongan atau motivasi yang menumbuhkan rasa minat dan sikap mereka untuk turut berpartisipasi, salah satunya adanya manfaat yang dapat dirasakan jika mereka turut aktif berpartisipasi; 3) Adanya kemampuan, adanya kesadaran pada diri mereka bahwa mereka memiliki kemampuan untuk turut berpartisipasi dan hal itu bisa berupa pikiran, tenaga, waktu, sarana dan bahkan material lainnya.(Hamid, 2018, p. 165)

Partisipasi masyarakat juga penting dalam aspek pengawasan dan evaluasi program. Masyarakat yang aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana. Dalam evaluasi, keterlibatan masyarakat memungkinkan adanya feedback yang jujur dan konstruktif, yang sangat penting untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program di masa yang akan datang. Namun, partisipasi masyarakat dalam LPMK tidak terjadi begitu saja. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Salah satu faktor utama adalah tingkat pendidikan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik tentang hak dan kewajibannya dalam pembangunan. Mereka juga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami proses administrasi dan teknis yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program. Selain

itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga LPMK juga berpengaruh besar terhadap tingkat partisipasi. Jika LPMK mampu menunjukkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat aktif. Sebaliknya, apabila terjadi penyimpangan, ketidaktransparan, atau konflik internal dalam tubuh LPMK, maka partisipasi masyarakat cenderung akan menurun. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah keberadaan pemimpin lokal yang inspiratif. Tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati dan memiliki kredibilitas tinggi sering kali mampu menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai teladan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan warga dengan program-program LPMK.

Pendekatan partisipatif harus dilakukan secara inklusif, artinya melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan usia, gender, status sosial, maupun tingkat pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar merefleksikan kebutuhan seluruh warga, bukan hanya kelompok tertentu. Modal sosial seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas yang masih kuat di banyak komunitas pedesaan Indonesia juga harus dimanfaatkan. Tradisi-tradisi ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam program-program LPMK. Melalui kegiatan gotong royong, misalnya, bukan hanya pekerjaan fisik yang terselesaikan, tetapi juga terbentuk solidaritas dan rasa memiliki terhadap program-program pembangunan.

Dalam jangka panjang, partisipasi masyarakat yang kuat dalam LPMK akan menghasilkan berbagai manfaat. Selain mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, partisipasi juga akan meningkatkan kapasitas sosial masyarakat, memperkuat kohesi sosial, serta membangun kemandirian komunitas. Masyarakat yang aktif berpartisipasi cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi, memahami mekanisme pemerintahan desa, serta mampu memperjuangkan hak-haknya dengan cara-cara yang konstruktif.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:04) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.(STIE Dewantara, 2024, hlm. 1)

Dalam konteks Penguanan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) di Kalurahan Triwidadi Pajangan Bantul. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk mendapatkan gambaran yang jelas

tentang bagaimana LPMK berfungsi, apa saja faktor pendukung dan penghambat serta bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan.

2. Unit Analisis

a. Objek Penelitian

Dapat dilihat bagaimana upaya meningkatkan kapasitas, peran, dan efektivitas LPMK dalam menjalankan program pemberdayaan dan pembangunan desa serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja LPMK di Kalurahan Triwidadi.

b. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pengurus LPMK (ketua, wakil dan beberapa anggota), Perangkat Desa, dan beberapa masyarakat Kalurahan Triwidadi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang bertujuan untuk mengamati langsung kegiatan dan program-program yang dijalankan oleh LPMK. Dengan begitu peneliti dapat melihat kondisi lingkungan, proses pelaksanaan program-program, dan juga keterlibatan masyarakat secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara akan dilakukan secara terstruktur yaitu pewawancara akan menetapkan

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada 2 Perangkat Desa, Ketua LPMK dan 6 anggota LPMK serta 2 masyarakat.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.(STIE Dewantara, 2024, hlm. 4)

Dalam penelitian ini dokumentasi LPMK berupa laporan kegiatan.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman analisis data model interaktif ini memiliki 3 komponen yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data kualitatif itu harus ada dalam analisis data kualitatif.(STIE Dewantara, 2024, hlm. 5).

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2016:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya. Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya akan mereduksi atau menyaring data.(STIE Dewantara, 2024, hlm. 5)

b. Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2016:247) menjelaskan penyajian data dalam penelitian kualitatif, data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.(STIE Dewantara, 2024, hlm. 5)

Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data membantu peneliti melihat pola atau hubungan antar data.

c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti membuat interpretasi berdasarkan temuan yang diperoleh, kesimpulan awal kemudian diverifikasi melalui data tambahan atau pengecekan ulang untuk memastikan validitas dan

keabsahan hasil analisis. Verifikasi bisa dilakukan dengan triangulasi, yaitu dengan membandingkan data beberapa sumber atau metode, misalnya membandingkan data wawancara dgn data dokumentasi. Untuk mendapatkan kesimpulan yang konsisten.

BAB II

GAMBARAN UMUM LPMK TRIWIDADI

A. LPMK Triwidadi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kalurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. LPMK berperan sebagai fasilitator dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pembangunan di tingkat kalurahan. LPMK berawal dari konsep pemberdayaan masyarakat yang diperkenalkan dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional. Lembaga ini diadaptasi dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang sebelumnya berperan dalam pembangunan desa. Dengan berkembangnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat, LPMK mengalami transformasi untuk lebih menyesuaikan dengan karakteristik perkotaan dan kelurahan.

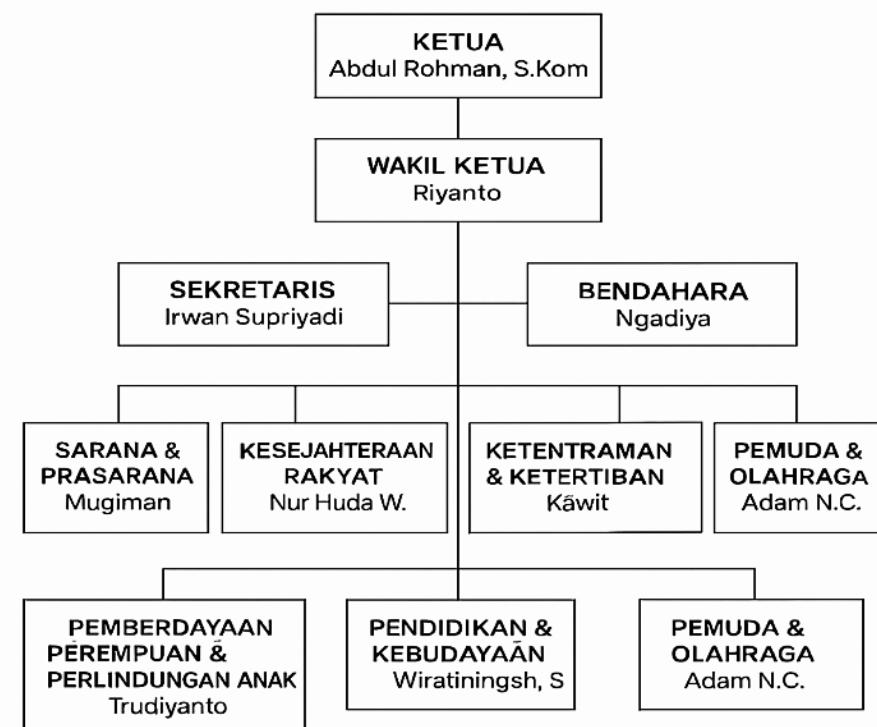
Dasar hukum pembentukan LPMK diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Peraturan ini menegaskan bahwa LPMK berperan sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan efektivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Selain itu, kewenangan LPMK juga diperjelas dalam Keputusan Lurah Triwidadi Nomor 38 Tahun 2022, yang

secara khusus mengatur tentang pengangkatan pengurus, serta menetapkan fungsi dan tugas LPMK dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan di kalurahan. Dengan adanya dasar hukum ini, LPMK memiliki legitimasi yang kuat untuk berperan dalam mewujudkan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, sehingga mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kalurahan.

1. Struktur LPMK

Struktur LPMK merupakan susunan organisasi yang terdiri dari berbagai unsur kepengurusan yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan peran LPMK. Struktur ini disusun untuk memastikan bahwa setiap aspek kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya struktur yang jelas, LPMK dapat berfungsi secara efektif sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam mendorong partisipasi masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

**Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
(LPMK) Tahun 2022-2027**



No	Nama	Jabatan
1	Ketua	Abdul Rohman S. Kom
2	Wakil Ketua	Riyanto
3	Sekretaris	Irwan Supriyadi
4	Bendahara	Ngadiya
5	Seksi Sarana Dan Prasarana	Mugiman
6	Seksi Perekonomian	Nur Huda Waskita Yoga
7	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Risman
8	Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	Kawit
9	Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Wiratiningsih, S.IP
10	Seksi Pemuda Dan Olah Raga	Adam Nur Cahyo
11	Seksi Pendidikan Dan Kebudayaan	Trudiyanto
12	Anggota	Amar Hanif
13	Anggota	Moko
14	Anggota	Adam
15	Anggota	Ainun
16	Anggota	Bayu
17	Anggota	Cahyo
18	Anggota	Abdul

Sumber: Dokumen Pribadi 7 Februari 2025

Berdasarkan tabel di atas, LPMK memiliki program yang diutamakan yaitu adalah pembangunan di bidang infrastruktur. Fokus ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat Kalurahan Triwidadi yang masih memerlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar guna mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Beberapa program yang secara konsisten dijalankan antara lain adalah pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan untuk mempermudah akses mobilitas antar wilayah, pembangunan saluran drainase guna mengatasi genangan air dan potensi banjir saat musim hujan, serta pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) untuk meningkatkan keamanan lingkungan pada malam hari. Selain itu, LPMK juga aktif dalam pembangunan fasilitas umum seperti balai warga, tempat ibadah, dan pos ronda yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Program-program tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui pendekatan gotong royong dan swadaya, LPMK berhasil membangun sinergi antara masyarakat dan pemerintah kalurahan dalam mewujudkan lingkungan yang lebih layak huni, aman, dan tertata. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan peran LPMK dalam bidang infrastruktur memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Triwidadi.

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan membahas dan menganalisis secara khusus terkait Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Triwidadi, dalam pembahasan ini bertujuan untuk memahami bagaimana penguatan LPMK dapat dilakukan, dengan menyoroti faktor pendukung, faktor penghambat yang dihadapi, serta strategi yang dapat dilakukan agar LPMK lebih berperan dalam pembangunan di kalurahan. Dari hasil ini menunjukkan bahwa LPMK Triwidadi memiliki peran dalam menampung aspirasi masyarakat dan juga membantu perencanaan pembangunan yang kemudian diatur dalam Keputusan Lurah Triwidadi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) dengan keputusan ini LPMK mempunyai tugas dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, dan melaksanakan urusan keistimewaan kalurahan. Namun, di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang membuat kinerja LPMK Triwidadi sendiri kurang optimal.

A. Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

1. Memperkuat Struktur LPMK

Ketika berbicara mengenai struktur, maka yang dimaksud adalah susunan kelembagaannya, peran, dan mekanisme kerja suatu lembaga agar dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Struktur yang kuat berarti

adanya pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik dengan pemerintah kalurahan dan lembaga lainnya, serta sistem kerja yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks di kalurahan triwidadi, struktur yang kokoh juga harus didukung dengan regulasi yang memperjelas kewenangan LPMK, penguatan struktur juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam LPMK, sehingga setiap anggota memiliki pemahaman yang baik mengenai fungsi dan tanggung jawabnya. Dengan struktur yang solid, LPMK dapat berperan lebih maksimal dalam menyusun perencanaan pembangunan, mengawasi pelaksanaannya, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan. Maka di lakukan wawancara dengan Bapak Abdul selaku Ketua LPMK Triwidadi, mengatakan bahwa:

“Struktur LPMK yang ada saat ini sudah cukup baik mbak, struktur ini tidak kecil tidak juga besar tetapi mampu untuk membantu koordinasi dalam menyusun, merencanakan dan membantu melaksanakan pembangunan di kalurahan. Struktur yang kokoh kan berarti mempunyai kewenangan dan mempunyai anggota yang paham akan tugasnya”.(Wawancara, 10/02/2025)

Pernyataan di atas ditambahkan oleh seorang anggota LPMK yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan bahwa:

“Mba, kalau dilihat dari Struktur organisasi LPMK Triwidadi sudah terbentuk dengan lengkap. Di dalamnya itu terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa seksi, tapi memang tidak semua pengurus bisa aktif setiap saat. Ada yang masih belum memahami tugasnya secara mendalam, dan sebagian lainnya memiliki kesibukan di luar lembaga”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan Ketua LPMK dan Seorang Anggota LPMK di atas peneliti dapat dinyatakan bahwa, dengan adanya struktur LPMK yang tidak

kecil dan tidak juga besar mengindikasikan adanya keseimbangan yang dianggap ideal. Struktur yang terlalu kecil mungkin kekurangan sumber daya manusia dan keahlian untuk menangani berbagai aspek pembangunan. Sementara struktur yang terlalu besar bisa menjadi lambat dalam pengambilan keputusan dan koordinasi antar pihak kalurahan maupun masyarakat. Keseimbangan ini penting untuk efisiensi dan efektivitas LPMK Triwidadi. Dengan adanya struktur yang baik dapat memfasilitasi komunikasi yang lancar antara pihak kalurahan, masyarakat maupun pihak lainnya. LPMK memiliki peran strategis dalam pembangunan di tingkat kalurahan dengan menjalankan fungsinya sebagai fasilitator yang berorientasi pada partisipasi masyarakat, di mana peran tersebut mencakup pengakomodasian berbagai kepentingan masyarakat serta memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dirancang dan diimplementasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Triwidadi.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, struktur LPMK Triwidadi dapat dikatakan cukup ideal. Susunan organisasinya tidak terlalu besar maupun terlalu kecil, sehingga memungkinkan tersedianya sumber daya manusia dan keahlian yang memadai tanpa menghambat koordinasi dan pengambilan keputusan. Struktur yang proporsional ini turut mendukung kelancaran komunikasi antara LPMK, pemerintah kalurahan, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam pelaksanaan perannya, LPMK berfungsi strategis sebagai fasilitator pembangunan dengan

mengedepankan partisipasi masyarakat agar setiap program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Namun, di sisi lain, peneliti juga menemukan bahwa masih terdapat pengurus LPMK yang belum memahami tugas dan peran mereka dengan baik. Struktur memang sudah mencakup ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa seksi, tetapi dalam praktiknya yang aktif dan dominan hanya pengurus inti. Bahkan, ketika peneliti menanyakan nama-nama anggota pengurus kepada pengurus LPMK yang lainnya sebagian tidak mengetahui secara lengkap. Selain itu, ada juga anggota yang kurang aktif mengikuti pertemuan atau melaksanakan program karena kesibukan pribadi di luar tugas LPMK. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur telah tersedia secara administratif, penguatan kapasitas dan internalisasi peran masih perlu ditingkatkan.

2. Fungsi Dan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Sebagai mitra pemerintah kalurahan, LPMK menjalankan fungsi strategis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. LPMK berperan sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat, fasilitator kegiatan pemberdayaan, serta penggerak partisipasi masyarakat agar terlibat aktif dalam pembangunan kalurahan. Peran ini menjadi sangat vital dalam mewujudkan

tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal. Di Kalurahan Triwidadi, fungsi dan peran LPMK tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menyentuh aspek sosial, seperti mendorong gotong royong, menjalin kolaborasi antar-lembaga kemasyarakatan, dan membangun solidaritas masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan musyawarah, pelatihan, serta pelaksanaan program pembangunan fisik dan non-fisik, LPMK menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

a. Perencanaan

Perencanaan yang baik memastikan bahwa setiap program dan kegiatan LPMK berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memiliki sumber daya yang memadai, serta dapat dieksekusi secara efisien dan berkelanjutan.

Wawancara bersama seorang anggota LPMK yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan bahwa:

“Mbak, dalam setiap proses perencanaan pembangunan di kalurahan, kami di LPMK selalu mengedepankan prinsip partisipatif dan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Sebelum program disusun, kami membuka ruang aspirasi yang melibatkan perwakilan masyarakat dari berbagai unsur, seperti pokgiatan padukuhan, RT, dan RW. Aspirasi yang masuk kami himpun dan diskusikan bersama dalam forum internal LPMK, lalu kami salurkan kepada pemerintah kalurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Dari situlah disepakati skala prioritas pembangunan antar padukuhan serta estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan”.(Wawancara, 7/02/2025).

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, dalam setiap proses perencanaan pembangunan di kalurahan, LPMK senantiasa

mengedepankan prinsip partisipatif serta mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Sebelum penyusunan program pembangunan dilakukan, LPMK terlebih dahulu membuka ruang aspirasi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti pokgiatan padukuhan, RT, dan RW. Aspirasi yang dihimpun dari masyarakat kemudian didiskusikan dalam forum internal LPMK untuk disaring dan disusun berdasarkan tingkat urgensinya. Hasil dari proses ini selanjutnya disampaikan kepada pemerintah kalurahan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan. Dalam forum tersebut, ditetapkan kesepakatan mengenai skala prioritas pembangunan antar padukuhan beserta estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. Dengan mekanisme tersebut, LPMK menjalankan peran strategis sebagai fasilitator dan penghubung antara masyarakat dan pemerintah, guna memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, memang terlihat bahwa LPMK menjalankan perannya secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan berbagai pihak masyarakat dalam tahapan awal penyaluran aspirasi. Peneliti mengamati bahwa forum-forum yang melibatkan perwakilan RT, RW, serta pokgiatan padukuhan cukup rutin dilaksanakan dan menjadi sarana komunikasi yang efektif antara masyarakat dan LPMK. Selain itu, terlihat bahwa LPMK tidak hanya

sekadar menjadi perantara administratif, tetapi benar-benar berupaya untuk menyusun skala prioritas program berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Dalam praktiknya, LPMK menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan berupaya menyusun program pembangunan yang tidak hanya bersifat merata, tetapi juga mempertimbangkan urgensi dan potensi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Peneliti melihat serta mendengar bahwa proses ini memperlihatkan adanya dinamika diskusi yang cukup sehat, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa tantangan seperti perbedaan kepentingan antar padukuhan yang terkadang muncul dalam proses penetapan prioritas. Namun demikian, secara umum, pengamatan peneliti menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang diterapkan LPMK telah berjalan relatif baik dan memberi ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahap penting dimana seluruh rencana yang telah disusun diterapkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Agar pelaksanaan berjalan efektif dan efisien, diperlukan pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap prosesnya.

Wawancara bersama Bapak Abdul selaku ketua LPMK mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program atau kegiatan, LPMK akan turut ikut serta dalam pelaksanaan program itu, seperti halnya

pengecoran jalan maupun lain-lainnya”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, LPMK memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, LPMK bukan hanya ada diproses perencanaan saja akan tetapi terlibat langsung di dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan, seperti halnya ketika ada kegiatan pengecoran jalan, LPMK dan masyarakat pun saling membantu. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi yang erat antara LPMK dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di kalurahan.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, LPMK Triwidadi memiliki peran aktif dalam menjalankan berbagai program yang telah dirancang sebelumnya. Keterlibatan LPMK dalam tahap pelaksanaan ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan. Pelaksanaan program dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik internal kalurahan maupun masyarakat, sehingga kegiatan yang dijalankan dapat berjalan secara efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Peneliti juga dapat melihat bahwa, ketika dalam proses pelaksanaan suatu program kerelaan masyarakat untuk saling membantu dengan LPMK sangatlah baik dan sangat bersemangat.

Pernyataan di atas ditambahkan oleh seorang masyarakat Triwidadi yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan bahwa:

“Mbak, ketika pelaksanaan pembangunan itu sedang berjalan, kami masyarakat dan juga LPMK sering kali saling membantu, terkadang ada kekurangan tenaga kerja dilapangan Ya kami saling membantu toh ini juga buat kemajuan kalurahan kami”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, Adanya kolaborasi antara masyarakat Triwidadi dan LPMK dalam pembangunan di Kalurahan Triwidadi. Kolaborasi ini menunjukkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan, di mana mereka tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga turut serta dalam pelaksanaannya. Sinergi antara LPMK dan masyarakat mencerminkan semangat gotong royong yang masih kuat, sehingga pembangunan di Kalurahan Triwidadi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Triwidadi tidak hanya melibatkan LPMK sebagai pelaksana, tetapi juga memperlihatkan peran aktif dari masyarakat secara langsung. Terlihat bahwa masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk turut ambil bagian dalam proses pembangunan, terutama ketika dibutuhkan bantuan tenaga atau dukungan lainnya di lapangan. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa pembangunan di Triwidadi bersifat partisipatif dan tidak bersandar sepenuhnya pada lembaga formal. Kebersamaan antara LPMK dan masyarakat dalam

menjalankan kegiatan pembangunan mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial, yang memperkuat keberhasilan pelaksanaan program serta menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan itu sendiri.

c. Pengawasan

Monitoring adalah proses pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program atau kegiatan. Tujuan utama dari monitoring adalah untuk memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan, baik dari segi waktu, anggaran, maupun pencapaian target.

Wawancara bersama Bapak Abdul selaku ketua LPMK mengatakan bahwa:

“Untuk monitoring kami LPMK mengawasi pelaksanaan mulai dari awal sampai akhir, agar setiap tahapan nya itu sesuai rencana mulai dari waktu, anggaran dan hasil yang akan didapat”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, Monitoring yang dilakukan oleh LPMK berperan penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan kegiatan atau program yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam proses monitoring ini, LPMK mengawasi beberapa aspek utama, yaitu ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan awal, serta hasil yang diperoleh dari program atau kegiatan tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, LPMK Kalurahan Triwidadi menjalankan fungsi monitoring secara aktif sejak

tahap awal pelaksanaan hingga program atau kegiatan selesai. Pengawasan ini mencakup aspek waktu pelaksanaan, kesesuaian penggunaan anggaran, serta hasil akhir yang ingin dicapai. Dengan terlibat langsung dalam proses ini, LPMK berupaya menjaga agar setiap langkah kegiatan tetap berada dalam jalur yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mencerminkan upaya LPMK dalam mengawal keberhasilan program, serta mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mengganggu tujuan pembangunan. Peran ini juga memperlihatkan bahwa LPMK tidak hanya fokus pada pelaksanaan semata, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengontrol kualitas dan efektivitas program secara menyeluruh.

Pernyataan di atas ditambahkan oleh seorang anggota LPMK yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan bahwa:

“Kalau monitoring itu kami biasanya mengawasi dari awal, tetapi ketika di pertengahan penggerjaan ada kendala seperti alat rusak, kami bisa langsung sigap untuk turun tangan atau yang sering terjadi itu perubahan cuaca, kan ini menunda lagi penggerjaannya”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, monitoring yang dilakukan oleh LPMK tidak hanya sebatas mengawasi jalannya kegiatan dari awal, tetapi juga mencakup respons cepat terhadap berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan. Dalam proses penggerjaan, berbagai hambatan seperti kerusakan alat dan perubahan cuaca dapat mempengaruhi kelancaran program pembangunan maupun program dan kegiatan non fisik lainnya. Karena itu, monitoring juga

berperan dalam mengidentifikasi masalah secara dini dan mengambil tindakan yang diperlukan agar pekerjaan dapat tetap berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, proses monitoring yang dilakukan oleh LPMK Triwidadi tidak hanya bersifat pasif sebagai pengamat, tetapi juga aktif dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di lapangan. Ketika muncul hambatan dalam proses pelaksanaan, seperti kerusakan alat atau kondisi cuaca yang tidak mendukung, LPMK menunjukkan kesigapan dalam merespons situasi tersebut. Ini menggambarkan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh LPMK tidak hanya fokus pada pencatatan dan pelaporan, tetapi juga mencakup tindakan langsung untuk memastikan kegiatan tetap berjalan.

d. Evaluasi

Melalui evaluasi, LPMK dapat mengukur keberhasilan suatu program berdasarkan indikator yang telah ditentukan, seperti kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, pencapaian target, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran. Evaluasi juga menjadi dasar bagi perbaikan dan pengambilan keputusan di masa mendatang agar program yang dijalankan semakin optimal dan berkelanjutan. Dengan adanya evaluasi yang baik, LPMK dapat meningkatkan kualitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan bahwa setiap kegiatan atau

program yang dilakukan benar-benar berdampak positif bagi kemajuan di tingkat kelurahan.

Wawancara bersama Bapak Abdul selaku ketua LPMK mengatakan bahwa:

“Evaluasi ini kan sangat penting mbak, untuk melihat sejauh mana program dan kegiatan yang dikerjakan apakah sesuai dengan perencanaan yang dibuat dan juga apakah sudah sesuai target atau bahkan untuk melihat kendala yang ada pada saat pelaksanaan. Evaluasi ini juga buat melihat efektivitas dan dampak dari program yang dibuat untuk masyarakat”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, evaluasi memiliki peran yang sangat penting dalam menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh LPMK. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan awal, mencapai target yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi kendala yang muncul selama proses berlangsung. Selain itu, evaluasi juga berfungsi untuk menilai efektivitas program dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan melakukan evaluasi, dapat diketahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari program tersebut, apakah sudah memberikan perubahan positif atau masih memerlukan perbaikan. Evaluasi ini juga menjadi dasar bagi perencanaan program selanjutnya agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Triwidadi.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa, proses evaluasi yang dilakukan oleh LPMK Kalurahan Triwidadi menunjukkan adanya

kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya refleksi dan penilaian menyeluruh atas program yang telah dijalankan. Evaluasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif semata, tetapi lebih sebagai instrumen strategis untuk menakar kesesuaian antara rencana dan realisasi, mengidentifikasi hambatan teknis maupun sosial, serta mengukur sejauh mana kebermanfaatan program bagi masyarakat. Pernyataan ketua LPMK juga mengisyaratkan bahwa evaluasi dimanfaatkan sebagai tolok ukur efektivitas dan dampak, yang kemudian menjadi landasan dalam merancang kebijakan dan program lanjutan. Hal ini menunjukkan adanya orientasi keberlanjutan dalam tata kelola pembangunan yang dijalankan oleh LPMK, serta upaya untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kalurahan. Tetapi peneliti belum tau pasti evaluasi dilakukan berapa kali dalam setiap program yang sudah dijalankan.

3. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini pengurus LPMK, merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh para pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemampuan ini mencerminkan sejauhmana pengurus dapat mengikuti pelatihan yang relevan, memberikan bimbingan dan motivasi kepada masyarakat, memahami aspek-aspek pendidikan dan kebijakan pembangunan yang terkait, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak, baik internal maupun

eksternal lembaga. Kapasitas SDM yang baik tidak hanya mendukung kinerja LPMK secara administratif dan teknis, tetapi juga berperan penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat serta memperkuat koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait.

a. Kapasitas Pengurus LPMK Dalam Membangun Komunikasi

Wawancara bersama seorang anggota LPMK yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan bahwa:

“Kapasitas kami di LPMK menjangkau hingga ke pokgiatan yang ada di 22 padukuhan, mulai dari tingkat RT, RW, sampai kalurahan. Kami mampu menjalin komunikasi yang cukup baik dengan mereka”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, Dalam kapasitas pengurus LPMK tidak hanya terbatas pada internal lembaga saja tetapi meluas hingga ke berbagai kelompok kegiatan seperti pokgiatan padukuhan di 22 padukuhan, serta mencakup koordinasi dengan RT, RW sampai pada pemerintah kalurahan. Dengan kemampuan komunikasi yang baik hal ini menjadi faktor penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah kalurahan, sehingga setiap kebutuhan dan permasalahan yang muncul di tingkat masyarakat dapat tersampaikan secara efektif. Dengan komunikasi yang terjalin secara optimal, proses penyusunan, perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Triwidadi dapat lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa LPMK memiliki peran strategis dalam membangun sinergi antara berbagai elemen masyarakat, sehingga

pembangunan yang dilakukan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, pengurus LPMK Kalurahan Triwidadi memiliki kapasitas komunikasi yang sangat baik dan menyeluruh, tidak hanya terbatas di internal lembaga, tetapi juga mencakup hubungan dengan kelompok kegiatan (pokgiatan) di 22 padukuhan, RT, RW, hingga pemerintah kalurahan. Kemampuan ini menunjukkan adanya pola komunikasi yang terstruktur dan efektif, yang menjadi fondasi penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Dengan komunikasi yang terjalin secara optimal, proses pembangunan menjadi lebih partisipatif karena melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Hal ini juga memperkuat peran strategis LPMK dalam membangun sinergi lintas elemen di kalurahan, sehingga setiap program yang direncanakan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Komunikasi yang baik juga didukung oleh adanya kedekatan hubungan atau saling mengenal antarwarga masyarakat. Hal ini membuat komunikasi antara LPMK dan masyarakat Kalurahan Triwidadi menjadi erat dan efektif dalam setiap pelaksanaan program maupun juga dalam penyampaian informasi.

b. Kapasitas Pengurus LPMK Dalam Pemanfaatan Teknologi

Wawancara bersama seorang anggota LPMK yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan bahwa:

“Dalam pemanfaatan teknologi yang ada LPMK yaitu Pak Abdul sebagai ketua LPMK, merancang sebuah website kalurahan yang digunakan sebagai ruang informasi publik bagi masyarakat maupun siapa saja yang mau mencari informasi tentang Kalurahan Triwidadi”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dinyatakan bahwa, LPMK Triwidadi telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Inisiatif yang dilakukan oleh Ketua LPMK ini dalam merancang sebuah website kalurahan menunjukkan upaya inovatif dalam menyediakan ruang informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat maupun pihak lain yang membutuhkan data mengenai Kalurahan Triwidadi. Dengan adanya website ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi yang efektif, sehingga informasi terkait program pembangunan, kebijakan, maupun kegiatan di kalurahan dapat tersampaikan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan. Selain itu, pemanfaatan teknologi ini juga mencerminkan komitmen LPMK dalam mengikuti perkembangan digitalisasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka serta partisipatif.

Berdasarkan pengamatan peneliti, LPMK Triwidadi telah menunjukkan kemajuan dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterbukaan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari hal tersebut adalah inisiatif Ketua LPMK dalam merancang website kalurahan yang berfungsi

sebagai pusat informasi publik. Langkah ini mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya akses informasi yang mudah dan cepat di era digital. Website tersebut tidak hanya menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai informasi terkait kegiatan dan program pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat luas. Pemanfaatan teknologi ini menunjukkan bahwa pengurus LPMK memiliki visi yang modern serta adaptif terhadap perkembangan zaman, dan berkomitmen dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih informatif, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak seluruh informasi tersedia atau dapat diakses secara terbuka melalui website tersebut. Selain itu, terdapat beberapa konten atau informasi yang kurang diperbarui secara berkala, seperti data penduduk terbaru yang belum di-update. Hal ini kan bisa saja menjadi kendala untuk masyarakat maupun siapa saja yang sedang membutuhkan informasi tentang Kalurahan Triwidadi.

c. Kapasitas Pengurus LPMK Dalam Membangun Relasi

Wawancara bersama seorang anggota LPMK yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan bahwa:

“Mba, dalam kapasitas LPMK ini kami sudah mampu untuk membangun relasi (link) ke beberapa anggota DPR dari kabupaten dan provinsi untuk kepentingan pembangunan kalurahan kami ini”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, kemampuan kapasitas pengurus LPMK Triwidadi mulai dari ketua, sekretaris dan

lainnya, memiliki kemampuan untuk membangun sebuah hubungan strategis (relasi) dengan beberapa anggota DPR tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi. Dengan relasi yang luas ini LPMK mempunyai peluang untuk mendapatkan dukungan anggaran serta akses terhadap program pemberdayaan yang lebih besar.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, pengurus LPMK Triwidadi memiliki kapasitas yang baik dalam membangun relasi strategis dengan aktor-aktor penting di tingkat kabupaten maupun provinsi, khususnya anggota DPR. Kemampuan ini menunjukkan bahwa LPMK tidak hanya aktif dalam lingkup internal kalurahan, tetapi juga mampu memperluas jaringan eksternal demi kepentingan pembangunan wilayahnya. Relasi yang terbangun tersebut menjadi modal sosial yang penting bagi LPMK dalam mengakses dukungan anggaran dan berbagai program pemberdayaan. Hal ini mencerminkan bahwa pengurus LPMK memiliki inisiatif, komunikasi yang efektif, serta strategi yang tepat dalam menjalin kemitraan yang bermanfaat bagi masyarakat Triwidadi.

4. Sumber Daya Manusia Dalam Hal Masyarakat Triwidadi

Berbicara mengenai SDM LPMK tidak terlepas kaitannya dengan SDM masyarakatnya juga. Hal ini disebabkan karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan representasi dari masyarakat itu sendiri yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kualitas SDM masyarakat yang baik akan memberikan dorongan besar terhadap

keberhasilan program-program yang dirancang dan dilaksanakan oleh LPMK. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup, keterampilan yang memadai, serta kesadaran berorganisasi dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial akan lebih mudah diajak bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan kelembagaan di lingkungan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu mengidentifikasi kebutuhan lingkungan sekitarnya, serta memiliki komitmen untuk terlibat aktif dalam pembangunan, maka LPMK akan lebih mudah menjalankan fungsinya. Hal ini menciptakan hubungan timbal balik antara LPMK dan masyarakat, di mana LPMK menjadi fasilitator dan motivator, sementara masyarakat menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Dengan begitu, partisipasi masyarakat tidak bersifat semu, melainkan menjadi kekuatan nyata dalam proses pembangunan kelurahan yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan LPMK dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menyerap informasi, memanfaatkan sumber daya, serta berinovasi dalam memecahkan persoalan yang ada di lingkungannya. Misalnya, dalam hal perencanaan pembangunan, masyarakat yang memiliki SDM unggul akan mampu memberikan masukan yang konstruktif, menyusun skala prioritas, dan ikut serta dalam pelaksanaan maupun pengawasan program. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan SDM masyarakat merupakan langkah awal

yang penting dalam menciptakan LPMK yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendidikan non-formal, maupun penyuluhan harus terus digalakkan untuk memperkuat sinergi antara LPMK dan masyarakat.

Wawancara bersama Bapak Mulyadi selaku *Ulu-ulu* Kalurahan Triwidadi mengatakan bahwa:

“Kalau dilihat dari SDM, masyarakat Triwidadi memang sudah sangat baik karena mereka itu sudah memiliki pemahaman, ketrampilan dan juga kesadaran partisipasi yang cukup tinggi dalam pembangunan”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, masyarakat Triwidadi memiliki kualitas SDM yang baik dalam mendukung pembangunan di kalurahan. Tingginya pemahaman dan kesadaran partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Partisipasi aktif ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif untuk membangun kalurahan secara bersama-sama. Selain itu, keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, terutama dalam bidang kerajinan, turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya pelaku usaha mandiri seperti (UMKM makanan dan kerajinan tangan lainnya) yang berkembang di kalurahan, perekonomian Kalurahan Triwidadi dapat semakin maju dan menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Hal ini menunjukkan bahwa SDM yang unggul tidak hanya mampu memahami konsep pembangunan, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat Kalurahan Triwidadi telah menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang progresif dalam mendukung agenda pembangunan. Tingginya tingkat pemahaman, keterampilan, dan kemauan untuk terlibat secara aktif menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendorong pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat seremonial, tetapi hadir dalam bentuk kontribusi nyata baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Selanjutnya, kapasitas masyarakat yang mumpuni ini tidak hanya berdampak pada kelancaran pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Masyarakat yang memiliki keterampilan kewirausahaan, khususnya dalam sektor UMKM seperti kuliner dan kerajinan tangan, telah menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif dan mandiri. Ini menandakan bahwa pembangunan manusia di Triwidadi tidak berhenti pada aspek teoritis semata, melainkan telah mewujud dalam praktik keseharian yang memberikan manfaat langsung bagi komunitas.

Namun disisi lain, jika ditinjau lebih dalam, pembangunan kapasitas masyarakat di Kalurahan Triwidadi masih belum sepenuhnya maksimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya akses dan frekuensi pelatihan bagi pelaku UMKM, baik dalam hal manajemen usaha, pemasaran digital, hingga peningkatan kualitas produk. Padahal, pelatihan-pelatihan semacam ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal serta memperluas jejaring pasar, baik di tingkat regional maupun nasional. Ketidakcukupannya pelatihan menyebabkan sebagian pelaku usaha

masih menjalankan usahanya secara konvensional dan belum mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Selain itu, bentuk pendidikan non-for mal bagi masyarakat seperti penyuluhan, kursus keterampilan, dan kegiatan pembelajaran masyarakat juga masih tergolong minim. Kurangnya penyediaan ruang belajar alternatif ini menjadi salah satu hambatan dalam memperluas pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tidak lagi mengenyam pendidikan formal. Padahal, pendidikan non-formal memiliki peran strategis dalam membentuk SDM yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah Kalurahan, LPMK, dan stakeholder terkait untuk memperkuat program pemberdayaan melalui pelatihan UMKM dan pendidikan non-formal secara lebih intensif dan merata di seluruh wilayah Kalurahan Triwidadi.

Hal ini ditambahkan oleh Bapak Abdul selaku ketua LPMK mengatakan bahwa:

“SDM masyarakat Kalurahan Triwidadi sudah cukup baik, namun masih terdapat kekurangan dalam hal pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, kami dari LPMK berencana dalam waktu dekat akan menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada pengembangan UMKM serta pelatihan penggunaan teknologi untuk keperluan promosi”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, hal ini menggambarkan kondisi riil SDM di Kalurahan Triwidadi yang secara umum sudah memiliki potensi yang baik, namun masih menghadapi tantangan dalam hal peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan

pelatihan. Kesenjangan ini terlihat terutama pada pelaku UMKM yang masih terbatas dalam pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan usaha serta pemanfaatan teknologi untuk promosi produk.

Langkah yang diambil oleh LPMK berupa rencana penyelenggaraan program pelatihan dan pendidikan menjadi upaya strategis dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya pelatihan UMKM, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta lebih siap bersaing di pasar. Sementara itu, pelatihan pemanfaatan teknologi (misalnya media sosial dan e-commerce) bertujuan untuk membuka akses pasar yang lebih luas melalui promosi digital. Program ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya SDM yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat kalurahan.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, kualitas sumber daya manusia masyarakat Kalurahan Triwidadi tergolong cukup baik. Namun karena, masih terdapat kekurangan dalam hal pelatihan dan kegiatan pemberdayaan yang seharusnya difasilitasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) sebagai lembaga yang berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan adanya program-program non-fisik yang dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal.

Peneliti menemukan bahwa Ketua LPMK telah merencanakan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam waktu dekat, yang mencakup kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, terdapat pula rencana pengembangan program berbasis hasil produktivitas masyarakat, seperti kegiatan makan sehat dengan bahan dasar ikan, sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi lokal sekaligus meningkatkan kesadaran gizi di kalangan masyarakat.

Wawancara bersama Bapak Mulyadi selaku *Ulu-ulu* kalurahan Triwidadi mengatakan bahwa:

“Sebelum melakukan program pembangunan fisik maupun non fisik, biasanya kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi sejauh ini masyarakat sudah cukup paham dengan program yang dijalankan terutama dalam pembangunan fisik seperti pembangunan jalan lingkungan karena itu terus terulang, jadi mereka sudah cukup paham”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, pemerintah kalurahan maupun masyarakat sudah paham akan perencanaan pembangunan, karena sebelum menjalankan program, selalu dilakukan sosialisasi sebagai bentuk komunikasi dan transparansi. Selain itu, masyarakat sudah terbiasa dengan program pembangunan fisik yang sering dilakukan, seperti pembangunan jalan, sehingga mereka sudah memahami proses dan mekanismenya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pola pembangunan yang berulang membuat masyarakat semakin terlibat dan mengerti pentingnya perencanaan dalam setiap kegiatan pembangunan.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, proses sosialisasi yang dilakukan oleh LPMK telah membentuk pemahaman yang cukup matang di kalangan masyarakat terkait pembangunan, khususnya dalam aspek fisik. Masyarakat tidak lagi bersikap asing terhadap program-program seperti pembangunan jalan lingkungan karena intensitas kegiatan tersebut yang bersifat rutin telah membentuk semacam pola yang familiar. Kebiasaan ini secara tidak langsung telah membangun literasi masyarakat terhadap proses pembangunan, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sosialisasi bukan hanya sebagai formalitas awal program, tetapi menjadi medium edukatif yang memperluas wawasan masyarakat terhadap pentingnya perencanaan yang matang dalam pembangunan. Dengan begitu, pemahaman kolektif yang terbentuk tidak hanya bersifat pasif sebagai penerima informasi, tetapi juga aktif dalam bentuk kesiapan untuk terlibat dan memberi kontribusi nyata dalam setiap proses pembangunan yang dijalankan.

Wawancara bersama Bapak Guyanta selaku *Jogoboyo* Kalurahan Triwidadi mengatakan bahwa:

“Memang untuk sosialisasi mengenai pembangunan fisik mungkin masyarakat sudah cukup paham, tetapi untuk non fisik ini kan masih kurang paham seperti pelatihan, penyuluhan, pendidikan budaya dan pendampingan”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, untuk sosialisasi mengenai pembangunan fisik memang masyarakat Triwidadi sudah cukup paham karena itu pembangunan yang sering terulang, akan tetapi untuk pembangunan non fisik ini masyarakat triwidadi masih kurang paham dan

sadar seperti (pelatihan UMKM, penyuluhan dan bimbingan belajar untuk anak-anak, penyuluhan kesehatan dan pelatihan pendampingan kerja menjahit). Maka dari itu dibutuhkannya sosialisasi agar masyarakat mempunyai kesadaran dan juga paham.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, adanya ketimpangan pemahaman masyarakat antara pembangunan fisik dan non fisik. Kegiatan pembangunan fisik yang sering dilakukan dan memiliki bentuk hasil yang konkret telah membentuk pemahaman yang cukup kuat di tengah masyarakat. Namun, berbeda halnya dengan program non fisik yang sifatnya abstrak dan berorientasi pada pengembangan kapasitas individu serta kelompok, seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan kesehatan, dan pendidikan budaya. Program-program ini masih belum dipahami secara utuh oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas pelaksanaan program non fisik belum sebanding dengan pembangunan fisik, baik dari segi frekuensi maupun metode pendekatannya. Kurangnya pemahaman ini juga memperlihatkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan LPMK maupun pemerintah kalurahan terhadap kegiatan non fisik masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kalurahan, sangatlah penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan

adanya keterlibatan aktif, masyarakat dapat memberikan masukan, mengawasi jalannya pembangunan, dan ikut serta dalam pelaksanaannya, sehingga pembangunan menjadi lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, partisipasi juga mencerminkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan dilingkungannya. Ketika masyarakat turut serta dalam prosesnya, hasil yang dicapai cenderung lebih maksimal dan bermanfaat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan yang baik harus selalu melibatkan masyarakat di dalamnya.

Wawancara bersama Bapak Guyanta selaku *Jogoboyo* Kalurahan Triwidadi mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat Triwidadi sangat baik, Keikut sertaan masyarakat dalam perencanaan sampai pada pelaksanaanya sangat aktif. Karena ini kan yang dibutuhkan masyarakat dan dengan semangat partisipasi yang tinggi ini menjadikan mereka mempunyai rasa memiliki terhadap hasil dari program”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, tingginya tingkat partisipasi masyarakat Triwidadi dalam pembangunan memiliki implikasi positif terhadap keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di Kalurahan Triwidadi. Rasa memiliki yang tumbuh sebagai hasil dari partisipasi aktif mendorong masyarakat untuk turut serta dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat yang tinggi juga memungkinkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga hasil pembangunan lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Triwidadi.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, tingginya keterlibatan masyarakat Triwidadi dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, menjadi kekuatan utama dalam membangun model pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif ini bukan hanya menunjukkan adanya kesadaran kolektif atas pentingnya pembangunan desa, tetapi juga mencerminkan internalisasi nilai kepemilikan terhadap setiap hasil pembangunan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan secara langsung, mereka tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pembangunan, melainkan juga pelaku sekaligus penjaga dari keberlangsungan program tersebut. Fenomena ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas, tetapi telah menjadi budaya sosial yang hidup di Triwidadi. Hal ini menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam proses pembangunan karena dapat memperkuat solidaritas, mempercepat penyelesaian masalah di lapangan, dan meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat yang tinggi seperti ini perlu terus dipelihara dan diperluas sebagai strategi untuk menciptakan pembangunan desa yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

Pernyataan di atas ditambahkan oleh Bapak Abdul selaku ketua LPMK, mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat disini sangat tinggi, ketika LPMK menjalankan program pembangunan masyarakat ini mempunyai kerelaan untuk saling membantu dalam kelancaran pembangunan”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan diatas dapat dinyatakan bahwa, masyarakat Triwidadi mempunyai kerelaan gotong royong yang sangat tinggi untuk membantu keberhasilan pembangunan di Kalurahan Triwidadi, dengan melihat partisipasi masyarakat yang baik ini berarti rasa tanggung jawab terhadap hasil pembangunan itu ada, sehingga masyarakat tidak hanya menikmati hasilnya, tetapi juga turut serta dalam pemeliharaan dan pengembangannya. Hal ini mencerminkan kesadaran bersama bahwa pembangunan yang dilakukan merupakan aset bersama yang harus dijaga demi keberlanjutan dan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Triwidadi.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, masyarakat Kalurahan Triwidadi menunjukkan tingkat kepedulian sosial yang sangat tinggi terhadap proses pembangunan di wilayah mereka. Antusiasme yang ditunjukkan masyarakat dalam mendukung program yang dijalankan oleh LPMK tidak semata-mata lahir dari kewajiban administratif, melainkan tumbuh dari kesadaran kolektif akan pentingnya peran aktif dalam menciptakan perubahan. Kesiapan mereka untuk bergotong royong menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya dipahami sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai upaya bersama yang menyatukan nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial.

B. Efektivitas Peran LPMK

Efektivitas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Triwidadi dapat dilihat dari sejauh mana lembaga ini mampu

menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, perencana, dan penggerak pembangunan yang partisipatif. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPMK Triwidadi telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, khususnya dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Tingginya partisipasi masyarakat, dukungan dari pemerintah kalurahan, dan struktur kelembagaan yang relatif stabil menjadi faktor-faktor yang mendukung efektivitas peran LPMK.

Namun demikian, efektivitas tersebut tidak lepas dari sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah tumpang tindih kewenangan antara LPMK dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBDJ), yang seringkali menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Selain itu, keterbatasan anggaran yang dialokasikan kepada LPMK juga menjadi kendala dalam menjalankan program-program secara optimal.

1. Efektivitas Peran LPMK dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat

Wawancara bersama seorang anggota LPMK yang tidak bersedia disebutkan nama mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat itu juga kan yang menjadi faktor pendukung LPMK untuk pembangunan di Kalurahan Triwidadi, karena dengan adanya partisipasi aktif masyarakat membuat LPMK menjadi lembaga yang berjalan meskipun ada banyak kendala”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam keberhasilan LPMK, karena semakin tinggi keterlibatan masyarakat,

semakin efektif pula program pembangunan yang dijalankan. Masyarakat dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, seperti memberikan masukan dan aspirasi dalam ruang diskusi program atau musyawarah kalurahan satu tahun sekali, ikut gotong royong bersama untuk pembangunan, serta mendukung secara materiil maupun non-materiil dalam berbagai program yang dirancang oleh LPMK. Partisipasi ini tidak hanya mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap kemajuan kalurahannya, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan. Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat, keputusan yang diambil oleh LPMK lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga implementasinya dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang nyata. Selain itu, partisipasi masyarakat juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, karena masyarakat turut serta dalam pengawasan dan evaluasi program pembangunan. Dengan begitu, keterlibatan masyarakat yang tinggi tidak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga memastikan keberlanjutan serta efektivitas peran LPMK dalam mewujudkan kalurahan yang lebih maju dan sejahtera.

Berdasarkan pengamatan peneliti, keterlibatan masyarakat tidak sekadar menjadi pelengkap dalam pelaksanaan program, melainkan menjadi fondasi yang memperkuat legitimasi dan daya dorong lembaga. Dukungan aktif dari masyarakat, baik dalam bentuk kehadiran dalam forum musyawarah, keterlibatan dalam gotong royong, maupun kontribusi gagasan dan tenaga, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi

LPMK untuk menjalankan perannya meskipun dihadapkan pada keterbatasan internal maupun eksternal. Antusiasme masyarakat dalam mendukung inisiatif LPMK menunjukkan bahwa keberadaan lembaga ini tidak berdiri sendiri, melainkan mendapat kepercayaan dari komunitas yang dilayani. Keterlibatan ini tidak hanya membantu LPMK dalam menjangkau kebutuhan riil di masyarakat, tetapi juga memberikan dorongan moral bagi para pengurus untuk terus aktif dan responsif. Dalam situasi di mana LPMK menghadapi berbagai kendala seperti minimnya sumber daya atau tantangan koordinasi dengan pihak lain, kehadiran masyarakat sebagai mitra kolaboratif menjadi penyeimbang yang sangat krusial. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat tidak hanya memperkuat pelaksanaan teknis program, tetapi juga menopang eksistensi dan keberlanjutan peran LPMK sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan agenda pembangunan. Efektivitas partisipasi masyarakat tercermin dari konsistensi keterlibatan mereka di berbagai tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Partisipasi yang efektif bukan hanya bersifat reaktif atau sekadar hadir secara fisik, tetapi juga mencerminkan kesadaran kolektif, kepedulian, dan rasa memiliki terhadap proses pembangunan. Ketika masyarakat secara aktif menyuarakan kebutuhan mereka melalui musyawarah, ikut menyumbangkan ide kreatif, serta bersama-sama menjaga hasil pembangunan, maka proses pemberdayaan menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan.

Kondisi di Kalurahan Triwidadi menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang seperti ini telah terbangun cukup baik, meskipun tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa padukuhan menunjukkan antusiasme tinggi dengan swadaya material maupun tenaga, sementara yang lain masih terbatas pada keterlibatan saat pelaksanaan fisik saja. Oleh karena itu, tantangan ke depan bagi LPMK adalah menjaga kesinambungan partisipasi ini dengan pendekatan komunikasi yang lebih merata, mengakomodasi keberagaman karakter wilayah, serta memperkuat kapasitas masyarakat agar keterlibatan mereka tidak hanya sekadar simbolik, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan.

2. Efektivitas Peran LPMK dalam Mendorong Kapasitas Pengurus LPMK

Wawancara bersama Bapak Abdul selaku ketua LPMK mengatakan bahwa:

“Mbak faktor pendukung LPMK yang pertama itu kapasitas kami sebagai pengurus kami mampu untuk membangun link yang belum tentu semua orang bisa, dan juga mampu untuk memanfaatkan teknologi yang ada, kalau teknologi itu seperti akses jaringan tetapi ini baru dimulai dari Padukuhan Polaman saja”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, dalam kapasitas pengurus LPMK terutama ketua dan sekretaris mampu untuk membangun sebuah relasi (link) yang berkontribusi besar terhadap pembangunan di Kalurahan Triwidadi, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Relasi ini dijalin dengan beberapa anggota DPR di tingkat kabupaten dan provinsi,

sehingga LPMK berhasil mendapatkan anggaran yang cukup besar, sekitar 1,2 miliar rupiah. Dengan adanya dukungan pendanaan tersebut, program pembangunan di kalurahan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan signifikan dari segi anggaran. Hal ini menunjukkan LPMK juga memiliki kemampuan strategis dalam mengakses sumber daya dan pendanaan eksternal untuk mendukung kemajuan Kalurahan Triwidadi. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti akses jaringan internetsasi berupa jaringan wifi yang dimana LPMK berkerja sama bersama iconplus. Untuk internetsasi ini baru diterapkan pada Padukuhan Polaman saja. Dengan adanya internetsasi ini beberapa siswa dapat meningkatkan literasi digital mereka serta masyarakat dapat mengikuti pelatihan pengembangan skil melalui daring dan pelaku UMKM dengan mudah dapat mempromosikan usaha kepada publik. Selanjutnya, LPMK juga memanfaatkan teknologi dengan membuat website kalurahan, dimana hal ini membantu masyarakat dengan lebih mudah untuk mengakses informasi terkait kebijakan pemerintah, program pembangunan dan kegiatan terupdate yang ada dikalurahan. Hal ini menunjukkan bahwa LPMK berupaya mengembangkan inovasi melalui pemanfaatan teknologi.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, keberhasilan LPMK Triwidadi dalam menjalankan program-program pembangunan di Kalurahan Triwidadi tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang signifikan. Salah satu faktor kunci adalah kemampuan pengurus LPMK, khususnya ketua diikuti dengan sekertaris LPMK, dalam menjalin jejaring

strategis di luar lingkup kalurahan. Relasi yang dibangun dengan aktor-aktor di tingkat legislatif telah membuka akses terhadap sumber daya eksternal, khususnya dalam bentuk anggaran. Dukungan dana yang cukup besar, seperti yang berhasil diperoleh melalui komunikasi lintas sektor, menjadi penopang utama yang memungkinkan terlaksananya pembangunan tanpa terganggu oleh kendala finansial. Selain kekuatan jejaring, faktor lain yang turut menunjang keberhasilan LPMK adalah keberanian untuk melakukan inovasi berbasis teknologi. Pemanfaatan jaringan internet, meskipun masih terbatas pada wilayah tertentu, menunjukkan adanya komitmen untuk mendorong transformasi digital di tingkat lokal. Inisiatif ini membuka ruang baru bagi masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku UMKM, untuk meningkatkan kapasitas melalui akses informasi dan promosi daring. Tidak hanya itu, kehadiran website resmi kalurahan juga menjadi indikator bahwa LPMK tidak hanya bergerak dalam tataran fisik, tetapi juga mengembangkan channel informasi yang transparan dan mudah diakses. Faktor-faktor seperti keterbukaan informasi, penguasaan teknologi, dan kemampuan membangun kemitraan strategis inilah yang menjadi kekuatan utama LPMK dalam mendukung jalannya pembangunan di Triwidadi secara efisien dan berorientasi ke depan.

3. Efektivitas Peran LPMK dalam Mendorong SDM Masyarakat

Wawancara bersama Bapak Abdul selaku ketua LPMK mengatakan bahwa:

“Mba, SDM masyarakat di sini itu sudah cukup baik ya, hanya saja kurang pelatihan atau pendidikan yang diberikan. Misalnya untuk

pelatihan teknologi bagi penjualan online ini kan masih kurang, makanya LPMK mempunyai rencana dalam waktu dekat ini untuk mengadakan kegiatan pelatihan itu".(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, kualitas SDM masyarakat Triwidadi sudah cukup potensial terlihat dari kemampuan adaptasi serta keterbukaan mereka terhadap perubahan dan inovasi. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan karena keterbatasan akses terhadap program penguatan kapasitas, khususnya yang berkaitan dengan keterampilan berbasis teknologi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas peran LPMK tidak hanya dinilai dari pelaksanaan pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuannya dalam merespons kebutuhan aktual masyarakat di era digital, seperti pelatihan teknologi informasi dan pemasaran digital. Dengan adanya inisiatif LPMK untuk mengadakan pelatihan penjualan online, menunjukkan bahwa lembaga ini mulai mengarahkan peran pemberdayaan tidak hanya pada aspek infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat berbasis keterampilan digital.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, SDM masyarakat Triwidadi dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat dalam mendukung program pembangunan infrastruktur, yang menunjukkan kesadaran bahwa pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan mereka sendiri serta demi kemajuan kalurahan. Potensi SDM masyarakat juga tampak dari kemampuan mereka dalam mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meskipun masih terdapat kendala

dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) merencanakan kegiatan pelatihan bagi pelaku UMKM agar mereka dapat lebih berkembang, khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi untuk pemasaran produk secara mandiri.

4. Efektivitas Kewenangan LPMK

Wawancara bersama Bapak Abdul selaku ketua LPMK mengatakan bahwa:

“LPMK mempunyai kewenangan untuk membantu pembangunan di kalurahan itu pun baru-baru ini diatur di dalam Keputusan Lurah Triwidadi 2022”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, LPMK mempunyai kewenangan yang diatur dalam Keputusan Lurah Triwidadi Nomor 38 Tahun 2022 tentang pengangkatan pengurus LPMK kalurahan triwidadi yang tertulis pada 1 hal tentang mengangkat pengurus LPMK selanjutnya 2 dan 3 hal mengenai fungsi LPMK, dengan adanya kewenangan ini sehingga LPMK dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal. Dengan adanya kewenangan tersebut, LPMK dapat lebih aktif dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kalurahan. Kejelasan kewenangan ini juga memperkuat posisi LPMK sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Selain itu, kewenangan ini menjadi acuan bagi LPMK dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi kemajuan Kalurahan Triwidadi.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, keberadaan Keputusan Lurah Triwidadi Nomor 38 Tahun 2022 menjadi dasar legal yang memberikan pijakan formal bagi LPMK dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam pembangunan kalurahan. Kejelasan mengenai hak, tugas, dan wewenang tersebut menunjukkan adanya pengakuan institusional terhadap LPMK sebagai salah satu elemen penting dalam struktur pemerintahan desa. Dengan dukungan regulasi tersebut, LPMK memiliki ruang gerak yang lebih terstruktur dan legitimasi yang kuat untuk terlibat secara langsung dalam proses perencanaan hingga pengawasan pembangunan. Namun, meskipun sudah adanya kewenangan yang dibuat, tetapi di sisi lain LPMK merasa bahwa mereka kurang optimal menjalankan peran dan fungsi karena adanya tumpang tindih kewenangan. Dalam praktiknya, batas antara tugas LPMK dan peran perangkat kalurahan lainnya belum sepenuhnya tegas, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan program. Situasi ini menyebabkan beberapa inisiatif LPMK kurang maksimal karena perlu berhadapan dengan wilayah tugas yang tumpang tindih ini.

5. Efektivitas Anggaran Program LPMK

Wawancara bersama Bapak Abdul selaku ketua LPMK mengatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan pembangunan LPMK hanya di berikan anggaran sebesar Rp 6.000.000, inikan hanya sedikit mbak, dari anggaran yang sedikit ini LPMK mempunyai inovatif yaitu membangun link dengan beberapa anggota DPR kabupaten dan juga provinsi”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan utama bagi LPMK dalam menjalankan perannya di bidang pembangunan. Dengan hanya diberikan dana sebesar Rp 6.000.000, LPMK menghadapi keterbatasan dalam merealisasikan program pembangunan yang lebih luas dan berdampak besar bagi masyarakat. Namun, meskipun menghadapi kendala anggaran, LPMK tetap berupaya mencari solusi inovatif yang dinamakan (link) oleh LPMK, dengan membangun jaringan atau link dengan beberapa anggota DPR di tingkat kabupaten maupun provinsi. Langkah ini menunjukkan bahwa LPMK tidak hanya bergantung pada anggaran yang diberikan, tetapi juga proaktif dalam mencari sumber pendanaan tambahan guna mendukung program pembangunan di kalurahan.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, salah satu penghambat yang dihadapi LPMK dalam menjalankan program pembangunan di Kalurahan Triwidadi adalah terbatasnya anggaran yang tersedia. Dengan dana sebesar Rp 6.000.000, LPMK harus mengelola sumber daya yang sangat terbatas untuk mewujudkan berbagai inisiatif yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Anggaran yang minim ini tentu saja membatasi ruang gerak LPMK dalam melaksanakan program pembangunan yang lebih ambisius atau dengan cakupan yang lebih luas. Namun, meskipun menghadapi kendala tersebut, LPMK tidak menyerah begitu saja. Mereka menunjukkan kreativitas dan ketangguhan dengan membangun jaringan (link) dengan beberapa anggota

DPR di tingkat kabupaten dan provinsi. Dengan cara ini, LPMK dapat memperluas akses terhadap pendanaan eksternal yang lebih besar, sekaligus memperkuat hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kapasitas lebih untuk mendukung program pembangunan di kalurahan. Pendekatan ini mencerminkan sikap proaktif LPMK dalam memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi keterbatasan anggaran, sekaligus memastikan bahwa pembangunan di kalurahan tetap berjalan meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Hal ini juga menegaskan bahwa meskipun LPMK hanya memiliki dana terbatas, mereka tidak hanya bergantung pada anggaran dari pemerintah kalurahan, tetapi juga berusaha untuk mengakses sumber pendanaan lain yang lebih luas. Inovasi semacam ini menunjukkan bagaimana LPMK beradaptasi dengan keterbatasan dan terus berusaha untuk memperjuangkan kemajuan kalurahan melalui strategi yang lebih beragam dan efektif.

Wawancara bersama seorang anggota LPMK yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan bahwa:

“Dengan inovatif kami mencari anggaran dari luar berarti kan membantu pemerintah kalurahan juga, jadi anggaran itu kan masuknya ke yang atas (kalurahan) dulu lalu ke kami (LPMK) yang menjalankan program nantinya, tapi ketika anggaran itu masuk dan juga karena di kalurahan sudah ada TPK dan TPBDJ jadi mereka lah yang mengelolanya, makanya kan LPMK ini lembaga yang mati suri padahal kami mampu untuk membangun link itu untuk memudahkan LPMK dalam pengelolaan pembangunan di kalurahan”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, meskipun LPMK memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mencari anggaran tambahan dari

luar guna mendukung pembangunan di kalurahan, peran mereka tetap terbatas dalam pengelolaannya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBDJ) di tingkat kalurahan, Akibatnya, meskipun LPMK telah berusaha membangun jaringan dan memperoleh sumber pendanaan tambahan, mereka tidak memiliki wewenang penuh dalam pengelolaannya padahal putusan lurah sudah ada. Kondisi ini membuat LPMK seolah menjadi “lembaga yang mati suri”, karena meskipun memiliki potensi besar dalam membantu pembangunan, mereka tidak memiliki ruang gerak yang cukup dalam proses eksekusi program. Padahal, jika diberikan kewenangan yang lebih luas, LPMK dapat lebih berkontribusi secara langsung dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini mencerminkan adanya tantangan struktural dalam sistem pengelolaan pembangunan di kalurahan, di mana tumpang tindih tugas dan kewenangan antara tim-tim yang dibentuk menyebabkan efektivitas kerja LPMK menjadi terbatas. yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, meskipun LPMK memiliki kapasitas untuk mengakses sumber pendanaan eksternal guna mendukung pembangunan kalurahan, namun peran mereka dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program tetap terhambat oleh struktur yang ada. Salah satu tantangan utama adalah keberadaan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBDJ) yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya

lainnya di tingkat kalurahan. Ini menciptakan kondisi di mana meskipun LPMK aktif mencari dan mendapatkan dana tambahan untuk pembangunan, mereka tidak memiliki kendali penuh dalam penggunaan dan pengelolaan dana tersebut.

Ketidakselarasan antara peran LPMK yang berupaya aktif berinovasi dalam pembangunan dan struktur pengelolaan yang ada menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, yang pada gilirannya membatasi efektivitas kinerja LPMK. Meskipun LPMK berpotensi besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan pembangunan kalurahan, mereka terjebak dalam keterbatasan wewenang yang dimiliki, sehingga potensi tersebut tidak dapat dimaksimalkan. Selain itu, meskipun dua anggota LPMK terlibat dalam TPK dan TPBDJ, keberadaan dua tim ini justru menambah kompleksitas dan membatasi ruang gerak LPMK sebagai lembaga yang seharusnya lebih mandiri dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan antara kewenangan yang dimiliki oleh LPMK dan tanggung jawab yang diembannya. LPMK, sebagai wadah aspirasi masyarakat dan motor penggerak pembangunan di kalurahan, menjadi terhambat dalam menjalankan tugas-tugas yang lebih signifikan karena terbatasnya peran yang dapat mereka ambil dalam pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Wawancara bersama Bapak Guyanta selaku *Jogoboyo* kalurahan triwidadi mengatakan bahwa:

“Memang yang terjadi saat ini LPMK kurang optimal kerena itu dari kalurahan sudah dibentuk TPK dan TPBDJ, meskipun di dalam kedua tim itu sudah dimasukan satu anggota LPMK, tetapi ini kan menjadikan LPMK lemah dalam perencanaan pembangunan”.(Wawancara, 10/02/2025)

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa, keberadaan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBDJ) di Kalurahan Triwidadi berpengaruh terhadap efektivitas peran LPMK dalam perencanaan pembangunan. Meskipun dalam struktur kedua tim tersebut telah dimasukkan satu anggota LPMK, hal ini ternyata tidak cukup untuk memperkuat posisi LPMK dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan di tingkat kalurahan. Sebaliknya, kondisi ini justru melemahkan LPMK dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perencana pembangunan. Kelemahan ini terjadi karena adanya pembagian kewenangan yang kurang proporsional. LPMK yang seharusnya berperan dalam merancang dan mengawal pembangunan berbasis aspirasi masyarakat, justru kehilangan otoritasnya dalam perencanaan akibat dominasi peran dari TPK dan TPBDJ. Akibatnya, LPMK tidak memiliki ruang gerak yang cukup dalam menyusun prioritas pembangunan, karena keputusan lebih banyak dikelola oleh tim teknis yang ditunjuk oleh pemerintah kalurahan.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya, keberadaan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBDJ) di Kalurahan Triwidadi telah memberikan dampak signifikan terhadap peran LPMK dalam perencanaan pembangunan. Walaupun LPMK diikutsertakan

dalam kedua tim tersebut, hal ini belum cukup untuk memperkuat pengaruhnya dalam pengambilan keputusan. Keikutsertaan satu sampai dua anggota LPMK dalam tim-tim tersebut justru tidak mengimbangi dominasi peran teknis yang dipegang oleh TPK dan TPBDJ, yang lebih mengendalikan jalannya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembagian kewenangan yang kurang seimbang ini telah menyebabkan LPMK kehilangan ruang untuk menjalankan fungsinya dengan maksimal, terutama dalam hal merancang dan mengawasi pembangunan yang berbasis pada aspirasi masyarakat. Sebagai lembaga yang seharusnya berfokus pada keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, LPMK mengalami keterbatasan dalam menentukan prioritas dan arah kebijakan pembangunan karena lebih banyak keputusan yang ditentukan oleh tim teknis yang memiliki otoritas lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan proyek. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur pengelolaan pembangunan kalurahan, di mana LPMK sebagai lembaga yang diharapkan untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah justru terkekang dalam menjalankan peranannya. Padahal, jika peran LPMK lebih dikuatkan dan diberikan ruang lebih dalam proses pengambilan keputusan, maka perencanaan pembangunan bisa lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti mendapatkan informasi yang begitu beragam yakni berkaitan dengan penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Data-data penelitian yang diperoleh melalui proses penelitian secara langsung dalam jangka waktu yang telah disesuaikan dengan kebutuhan informasi, dan dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu mengumpulkan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga dalam penelitian yang dilakukan menjelaskan apa adanya dan sesuai data yang diperoleh dari informan.

Berikut ini peneliti akan menarik kesimpulan terkait hal-hal yang digunakan sebagai pendekatan serta menyimpulkan secara umum tentang penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan di Kalurahan Triwidadi sebagai berikut:

1. Penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Triwidadi merupakan upaya yang melibatkan berbagai aspek penting, termasuk struktur, manajemen, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. LPMK memiliki struktur yang seimbang, tidak terlalu kecil maupun besar, sehingga memungkinkan koordinasi yang efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi fokus, agar setiap anggota memahami peran dan tanggung

jawabnya. Selain itu, manajemen yang baik tercermin dalam perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat, pengorganisasian yang efisien, serta pelaksanaan dan monitoring program yang berkelanjutan. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan rasa memiliki terhadap hasil yang dicapai, yang berkontribusi pada keberlanjutan program. Forum musyawarah menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan, mendorong transparansi dari pemerintah kalurahan. Dengan kualitas SDM yang baik, masyarakat Triwidadi mampu berperan aktif dalam pembangunan, termasuk dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pelaku usaha mandiri. Secara keseluruhan, sinergi antara pemerintah, LPMK, dan masyarakat menciptakan proses pembangunan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang optimal.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) di Kalurahan Triwidadi menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan. Di antara faktor pendukung yang signifikan adalah tingginya partisipasi masyarakat, yang memungkinkan LPMK untuk menjalankan program secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, kapasitas pengurus LPMK dalam membangun relasi dengan pemangku kepentingan, termasuk anggota DPR, telah membantu mereka mengakses pendanaan yang lebih besar, serta kewenangan yang diatur dalam Keputusan Lurah memberikan landasan bagi LPMK untuk beroperasi secara optimal. Namun, tantangan utama yang

dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang hanya sebesar Rp 6.000.000, yang menghambat realisasi program-program yang lebih luas. Selain itu, keberadaan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBDJ) di tingkat kalurahan menyebabkan tumpang tindih kewenangan, sehingga mengurangi efektivitas LPMK dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Meskipun LPMK memiliki potensi dan inisiatif yang baik, keterbatasan ruang gerak dalam pengambilan keputusan membuat mereka berfungsi secara suboptimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat posisi LPMK dalam sistem pengelolaan pembangunan agar dapat berkontribusi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang tercantum maupun yang tidak tercantum, ada beberapa hal yang masih memiliki kekurangan sehingga peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Penting untuk memperkuat struktur LPMK dengan memperjelas pembagian tugas dan kewenangan di antara anggota, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan workshop yang fokus pada pengembangan keterampilan manajerial dan teknis, sehingga setiap anggota LPMK dapat menjalankan perannya dengan lebih baik.
2. Perlu adanya regulasi yang lebih jelas mengenai kewenangan LPMK dalam pengelolaan pembangunan, agar LPMK tidak hanya berfungsi sebagai

lembaga yang pasif. Regulasi ini harus mencakup pengaturan yang tegas mengenai hubungan kerja antara LPMK, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBDJ) untuk menghindari tumpang tindih tugas yang dapat menghambat efektivitas LPMK.

3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangatlah penting. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai program-program non-fisik, seperti pelatihan dan penyuluhan, perlu dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat berkontribusi secara aktif.
4. Pemanfaatan teknologi informasi harus terus ditingkatkan, seperti pengembangan website kalurahan yang dapat menjadi sarana komunikasi dan informasi yang efektif bagi masyarakat. Dengan adanya akses informasi yang transparan, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam proses pembangunan.
5. Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari setiap program yang dijalankan oleh LPMK. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, LPMK dapat mengidentifikasi kendala yang muncul dan melakukan perbaikan yang diperlukan, sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan LPMK dapat berperan lebih maksimal dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan di Kalurahan Triwidadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azkiya, I. I., & Kriswanto, H. D. (2024). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lpmk) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)*, 5(4), 724-739.
- Arbain, M. W. (2014). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(4), 3259-3272.
- Damaiwana, D., & Saleh, A. (2021). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lpmk) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Kelurahan Mamasa. *Mitzal (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 5(1), 94-109.
- Dhue, J. I., & Tokan, F. B. (2021). Pengaruh Kapasitas Pemerintah Merencanakan Pembangunan Desa, Di Desa Oben Kabupaten Kupang. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 335-356.
- Hasibuan, R. A. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Fisik di Kecamatan Medan Tembung. *H 3*
- Ismail, B., & Syarifuddin, H. (2021). Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi masyarakat Pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Batu. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 149-155.
- Isyabillilah, E., & Gustaman, F. A. (2023). Implementasi Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lpmk) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Taman Kota Madiun.
- Indriyani, I. (2022). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Laoli, P. N. V. (2022). Pelaksanaan Pembangunan Desa Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (Lpmkal) Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Stpmd" Apmd").
- Meidityas, G. R., & Sumaryana, A. (2024). Kapasitas Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Jipags (Journal Of Indonesian Public Administration And Governance Studies), 8(2).

Muhtarom, A. (2016). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan. Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi, 1(3), 24-Halaman.

Putri, Bd (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Perdesaan Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar (Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Buku:

Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, (Sleman Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (Fppd): 2014).

Website:

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/143587/permendagri-no-18-tahun-2018>,
diakses 20/11/2024

<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/173985/UU%20062014.pdf>, diaskes 11/11/2024

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>, diakses 11/11/2024

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/287564/perda-no-3-tahun-2024>, diakses 11/11/2024

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/188349/permendagri-no-76-tahun-2021>,
diakses 11/11/2024

<https://perpustakaan.mtsnkotabatu.sch.id/index.php?p=fstream&fid=33&bid=560>,
diakses 11/11/2024

https://etheses.iainkediri.ac.id/3554/3/931403317_bab2.pdf, diakses 22/11/2024.

<https://repository.stiedewantara.ac.id/2633/12/12.%20BAB%203.pdf>, diakses 20/11/2024

<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2732/5/16.3400.001%20BAB%203.pdf>,
diakses 20/11/2024

https://p3pd.my.id/berkas/modul/1704435229_d12b9eebbd1a2e2b0b7d.pdf,
diakses 22/11/2024

[https://journal.unwira.ac.id/index.php/WG/article/download/1555/474#:~:text=Menurut%20Milen%20dalam%20Rozaki%2Cdkk,organisasi%3B%20\(2\)%20memahami%20dan,](https://journal.unwira.ac.id/index.php/WG/article/download/1555/474#:~:text=Menurut%20Milen%20dalam%20Rozaki%2Cdkk,organisasi%3B%20(2)%20memahami%20dan,) diakses 22/11/2024 : <https://peraturan.bpk.go.id/Download/346779/perda%20diy%20nomor%2003%20tahun%202024.pdf>, diakses 22/11/2024

<http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/639/1/Buku%20Manajemen%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20PDF.pdf>, diakses 10/02/2025

https://repository.ub.ac.id/id/eprint/119110/1/BAB_I_II_III_ IV_V_new_new_clean.pdf, diakses 10/02/2025

<https://www.iiste.org/Journals/index.php/PPAR/article/viewFile/56908/58765> dan <https://repository.uir.ac.id/21527/1/Capacity%20Building%20of%20Local%20Government.pdf>, diakses 10/02/2025

<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/195940/1/La%20Ode%20Munawir.pdf>, diakses 10/02/2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2022
2022

TANGGAL : 19 Mei

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN
(LPMK) KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON
PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
MASA BHAKTI 2022-2027**

1. Ketua	: Abdul Rohman, S.Kom
2. Sekda II Ketua	: Budi Santosa
3. Sekertaris	: Irwan Supriyadi
4. Bendahara	: Ngadiya
5. Seksi Sarana dan Prasarana	: Mugiman
6. Seksi Perkonomian	: Nur Huda Waskita Yoga
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat	: Rismans
8. Seksi Kesehatan dan Keteribahan	: Kawit
9. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	: Wiratminggih, S.I.P
10. Seksi Pemuda dan Olah Raga	: Adam Nur Cahyo
11. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan	: Trisdyanto

LURAH TRIWIDADI,
SLAMET RIVANTO

Susunan Pengurus LPMK



Ruang Diskusi Perencanaan
Pembangunan



Pengawasan Pada Pelaksanaan
Pengecoran Jalan



Pengecoran Jalan Padukuhan Jambean



Evaluasi Program



Dokumentasi setalah wawancara
bersama Bapak Guyanta, selaku
Jogoboyo Kalurahan Triwidadi



Dokumentasi setelah wawancara bersama Bapak Mulyadi, selaku Ulu Ulu Kalurahan Triwidadi



Dokumentasi setelah wawancara bersama LPMK kalurahan Triwidadi



Dokumentasi setelah wawancara bersama Bapak Janari, selaku masyarakat Triwidadi